

STANDAR EITI 2023

Bagian 1: Prinsip dan persyaratan

Standar EITI 2023

Diterbitkan pada 12 Juni 2023

© EITI 2023

Dokumen ini (kecuali logo) dapat direproduksi secara gratis dalam format atau media apa pun, sepanjang direproduksi dengan akurat dan tidak digunakan dalam konteks yang menyesatkan. Materi di dalamnya harus diakui sebagai hak cipta EITI dengan menyebutkan judul dan sumber publikasi.

Hak cipta atas tata letak tipografi dan desain dimiliki oleh EITI.

STANDAR EITI 2023

Standar global untuk tata
kelola yang baik atas
sumber daya minyak, gas,
dan mineral

Daftar Isi

Pengantar	4
Menavigasi Standar EITI	6
BAGIAN 1: Prinsip-Prinsip EITI	7
BAGIAN 2: Menjadi Negara Pelaksana EITI	8
BAGIAN 3: Persyaratan EITI	9
PERSYARATAN 1: Pengawasan oleh pemangku kepentingan multi-pihak	10
1.1 Keterlibatan pemerintah	10
1.2 Keterlibatan perusahaan	10
1.3 Keterlibatan masyarakat sipil	11
1.4 Pemangku kepentingan multi-pihak	11
1.5 Rencana kerja, pemantauan, dan evaluasi	13
PERSYARATAN 2: Kerangka hukum dan kelembagaan, kontrak, dan izin	15
2.1 Kerangka hukum dan rezim fiskal	15
2.2 Alokasi kontrak dan lisensi	15
2.3 Daftar izin	17
2.4 Kontrak dan izin	18
2.5 Pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>)	19
2.6 Partisipasi negara	21
PERSYARATAN 3: Eksplorasi dan produksi	23
3.1 Kegiatan eksplorasi	23
3.2 Data produksi	23
3.3 Data ekspor	23
3.4 Emisi gas rumah kaca	24
PERSYARATAN 4: Pengumpulan penerimaan negara	25
4.1 Pengungkapan komprehensif atas pajak dan penerimaan negara	25

4.2	Penjualan bagian produksi atau penerimaan negara lainnya yang dipungut dalam bentuk natura (<i>in kind</i>)	26
4.3	Penyediaan infrastruktur dan pengaturan barter	27
4.4	Penerimaan dari transportasi	27
4.5	Transaksi terkait badan usaha milik negara	28
4.6	Pembayaran ke daerah	28
4.7	Tingkat disagregasi	28
4.8	Ketepatan waktu data	29
4.9	Kualitas dan jaminan data	29
4.10	Biaya proyek	30
PERSYARATAN 5: Manajemen penerimaan dan distribusi		31
5.1	Distribusi penerimaan	31
5.2	Transfer ke daerah	31
5.3	Informasi tambahan tentang pengelolaan penerimaan dan belanja	32
PERSYARATAN 6: Belanja sosial dan ekonomi		33
6.1	Belanja sosial dan pembayaran lingkungan	33
6.2	Belanja quasi-fiskal	34
6.3	Kontribusi sektor ekstraktif terhadap perekonomian	34
6.4	Dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekstraktif	35
PERSYARATAN 7: Hasil dan dampak		36
7.1	Debat publik	36
7.2	Aksesibilitas data dan data terbuka	37
7.3	Rekomendasi dari implementasi EITI	37
BAGIAN 4: Harapan terhadap perusahaan pendukung EITI		38
BAGIAN 5: Protokol: Partisipasi masyarakat sipil		41
BAGIAN 6: Kode Etik Asosiasi EITI		45
BAGIAN 7: Kebijakan data terbuka		49

Pengantar



EITI menandai dua tonggak penting pada tahun 2023, hari jadi ke-20 organisasi dan satu dekade penerapan EITI Standard. Mandat EITI untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam tetap sangat relevan di tengah krisis iklim yang semakin memuncak. Untuk pertama kalinya, dimasukkannya berbagai pengungkapan terkait transisi energi ke dalam Standar EITI membuka peluang baru bagi standar ini sebagai alat dialog dan perubahan di sektor energi yang tengah berkembang pesat.

Transisi ke energi bersih sebagai bagian dari upaya mengatasi darurat iklim mengubah lanskap sumber daya alam. Kombinasi antara pentingnya sumber daya alam di banyak negara, tantangan jangka panjang dalam mewujudkan manfaatnya bagi

seluruh masyarakat, dan transisi energi yang akan datang berarti bahwa tata kelola yang baik atas sumber daya di era transisi ini menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Data yang transparan, dapat diakses, dan berkualitas terus dibutuhkan oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Standar EITI tidak hanya menekankan pada pengungkapan – transparansi memang diperlukan, tetapi tidak cukup– melainkan juga pada partisipasi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, perlindungan ruang sipil, sebagaimana diwajibkan dalam Standar EITI, menjadi hal yang vital.

Peran EITI dalam tata kelola sektor ekstraktif sangat kritis seiring dengan penerapan Standar EITI yang direvisi. Standar ini merespons konteks sumber daya alam yang terus berkembang dalam dua cara.

Pertama, mengingat urgensi pergeseran permintaan dari bahan bakar fosil, terdapat persyaratan baru yang penting terkait pengungkapan informasi terkait, antara lain, pajak karbon dan mekanisme penetapan harga, emisi gas rumah kaca, biaya produksi, cadangan, dan subsidi. Pengungkapan perkiraan pendapatan dan biaya perusahaan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang perkiraan pendapatan dan keputusan investasi, sementara data tentang emisi gas rumah kaca dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, masyarakat, dan investor.

Kedua, sebagai respons terhadap peningkatan produksi mineral yang mendukung transisi energi, transparansi atas ketentuan transaksi dan siapa yang diuntungkan dari transaksi tersebut sangat krusial bagi tata kelola yang baik dan keberlanjutan pasokan.

Patut dicatat pula adanya ketentuan pengungkapan yang baru dan diperkuat pada area-area penting seperti kesetaraan gender, pemantauan dan dampak sosial serta lingkungan, pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat, serta konsultasi dengan masyarakat.

Sesuai dengan mandat EITI, sasaran anti-korupsi yang penting dan eksplisit telah diintegrasikan ke dalam pelaporan dalam Standar EITI 2023 ini. Pengungkapan yang penting untuk mengidentifikasi konflik kepentingan dan keterlibatan pihak yang memiliki eksposur politik dalam sektor ekstraktif telah diperkuat. Standar EITI baru juga memperkenalkan ekspektasi bahwa semua perusahaan yang berpartisipasi

dalam pelaporan EITI, termasuk badan usaha milik negara, harus mengungkapkan kebijakan anti-korupsinya secara terbuka.

Pengantar

Secara keseluruhan, di berbagai tema kunci dalam Standar EITI, dan dengan tujuan memperkuat tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan dalam EITI, Standar EITI ini juga menetapkan tanggung jawab bagi pelaporan perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, termasuk terkait pengungkapan baru terkait transisi energi.

Standar EITI 2023 ini menjawab kebutuhan akan standar tata kelola sumber daya alam yang semakin tinggi dan terus berkembang. Untuk pertama kalinya, transisi energi diintegrasikan ke dalam Standar EITI secara substansif. Hal ini membuka peluang bagi kelompok pemangku kepentingan multisektor di tingkat nasional untuk mempertimbangkan tantangan dan peluang paling signifikan dalam konteksnya masing-masing, serta menentukan prioritas implementasi mereka atas berbagai Persyaratan EITI. Hal ini membantu meningkatkan relevansi implementasi EITI di tiap negara, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang terbuka dan akuntabel dalam kerangka tanggung jawab bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.



Rt Hon. Helen Clark
Ketua Dewan EITI

Menavigasi Standar EITI

Dokumen ini mencakup **Bagian 1** dari Standar EITI (“Prinsip dan Persyaratan”), yang meliputi bagian-bagian berikut:

- **Prinsip-prinsip EITI:** Standar EITI berakar pada Prinsip-prinsip EITI (Bagian 1), yang disepakati oleh kelompok negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil yang beragam saat EITI dibentuk pada tahun 2003, untuk meningkatkan transparansi atas pembayaran dan pendapatan di sektor ekstraktif.
- **Menjadi negara pelaksana EITI:** Negara-negara yang berencana menerapkan Standar EITI diharuskan untuk melakukan sejumlah langkah sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI, sebagaimana dijelaskan dalam Menjadi Negara Pelaksana EITI (Bagian 2).
- **Persyaratan EITI:** Standar EITI menetapkan Persyaratan EITI (Bagian 3) bagi negara-negara yang menerapkan EITI dan perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang beroperasi di negara-negara tersebut. Pemangku kepentingan multi-pihak nasional – yang terdiri dari perwakilan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil – memantau implementasi EITI dan menetapkan tujuan yang mencerminkan prioritas nasional dalam pengelolaan sektor ekstraktif.
- **Harapan bagi perusahaan pendukung EITI:** Perusahaan minyak, gas, dan pertambangan mematuhi Standar EITI dengan melaporkan di negara-negara yang menerapkan EITI tempat mereka beroperasi, serta secara aktif berpartisipasi dalam proses EITI di negara-negara tersebut melalui keikutsertaan mereka dalam pemangku kepentingan multi-pihak. Perusahaan pendukung EITI lebih lanjut mendukung implementasi EITI dengan memenuhi Ekspektasi bagi Perusahaan Pendukung EITI (Bagian 4).
- **Protokol: Partisipasi masyarakat sipil:** Partisipasi masyarakat sipil merupakan hal yang fundamental dalam mencapai tujuan EITI. Protokol: Partisipasi masyarakat sipil (Bagian 5) menetapkan ketentuan-ketentuan untuk memastikan partisipasi yang penuh, aktif, dan efektif dari masyarakat sipil dalam implementasi EITI.
- **Kode Etik Asosiasi EITI:** Pemangku kepentingan diwajibkan untuk mematuhi standar integritas dan etika tertinggi serta bertindak dengan jujur dan sopan, sesuai dengan Kode Etik Asosiasi EITI (Bagian 6). Hal ini berlaku untuk semua Pejabat EITI, termasuk Anggota Asosiasi EITI, Anggota Dewan EITI, perwakilannya, staf sekretariat (nasional dan internasional), serta anggota kelompok pemangku kepentingan multipihak.
- **Kebijakan data terbuka:** Data terbuka merupakan inti dari misi EITI untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang terbuka dan akuntabel. Dengan membuat data mudah diakses, dimengerti, dan digunakan, pelaporan EITI dapat memperkuat debat publik, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan pemahaman publik tentang pengelolaan sumber daya alam. Tujuan-tujuan ini didukung oleh Kebijakan Data Terbuka EITI (Bagian 7).

Bagian 2 dari Standar EITI (“Pengawasan dan Validasi Dewan EITI”) menjelaskan prosedur dan kriteria yang menentukan cara Dewan EITI Internasional mengawasi dan menilai implementasi Standar EITI. **Bagian 3** (“Tata Kelola dan Manajemen EITI”) membahas bagaimana Asosiasi EITI dikelola.

Situs web EITI (www.eiti.org) dapat digunakan untuk mengakses Standar EITI secara lengkap, beserta panduan tentang implementasi berbagai aspek EITI.

BAGIAN 1

Prinsip-Prinsip EITI

Bagian ini menjelaskan tujuan umum dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, yang disepakati saat EITI didirikan pada tahun 2003.

Apa yang kini dikenal sebagai EITI berkembang dari pernyataan pertama Prinsip-Prinsip EITI yang disepakati pada Konferensi Lancaster House pada Juni 2003. Saat ini, Standar EITI mencakup prinsip-prinsip ini dan semua persyaratan untuk mengimplementasikan EITI. Keyakinan dan tujuan ini didukung oleh semua pemangku kepentingan EITI.

Prinsip-prinsip EITI menjadi landasan utama inisiatif ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kami meyakini bahwa penggunaan kekayaan sumber daya alam secara bijaksana seharusnya menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan kemiskinan, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.
2. Kami menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat suatu negara merupakan kewenangan pemerintah yang berdaulat untuk dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional.
3. Kami menyadari bahwa manfaat dari ekstraksi sumber daya alam terjadi sebagai aliran pendapatan selama bertahun-tahun dan dapat sangat bergantung pada fluktuasi harga.
4. Kami mengakui bahwa pemahaman masyarakat tentang pendapatan dan belanja pemerintah seiring waktu dapat membantu debat publik dan menjadi informasi dasar untuk pemilihan opsi yang tepat dan realistis bagi pembangunan berkelanjutan.
5. Kami menekankan pentingnya transparansi oleh pemerintah dan perusahaan di sektor ekstraktif serta kebutuhan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan akuntabilitas.
6. Kami menyadari bahwa pencapaian transparansi yang lebih besar harus dilakukan dalam rangka mematuhi kontrak dan hukum.
7. Kami menyadari bahwa transparansi keuangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi langsung dalam dan luar negeri.
8. Kami percaya pada prinsip dan praktik pertanggungjawaban pemerintah kepada seluruh masyarakat dalam pengelolaan aliran pendapatan dan belanja negara.
9. Kami berkomitmen untuk mendorong standar tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan masyarakat, operasi pemerintah, dan dunia usaha.
10. Kami percaya bahwa pendekatan yang konsisten dan dapat diterapkan secara luas dalam pengungkapan pembayaran dan pendapatan diperlukan dengan karakteristiknya yang sederhana untuk dilaksanakan dan digunakan.
11. Kami percaya bahwa pengungkapan pembayaran di suatu negara harus

melibatkan semua perusahaan industri ekstraktif yang beroperasi di negara tersebut.

12. Dalam mencari solusi, kami percaya bahwa semua pemangku kepentingan memiliki kontribusi penting dan relevan untuk diberikan, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaganya, perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi keuangan, investor, dan organisasi non-pemerintah.

BAGIAN 2

Menjadi Negara Pelaksana EITI

Bagian ini menjelaskan proses bagi negara-negara yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI.

Negara yang berencana menerapkan EITI diharuskan untuk melakukan sejumlah langkah pendaftaran sebelum mengajukan permohonan untuk menjadi negara pelaksana EITI. Langkah-langkah ini berkaitan dengan komitmen pemerintah (Persyaratan 1.1), keterlibatan perusahaan (Persyaratan 1.2), keterlibatan masyarakat sipil (Persyaratan 1.3), pembentukan kelompok pemangku kepentingan multi-pihak (Persyaratan 1.4), dan kesepakatan mengenai rencana kerja EITI dan siklus pemantauan (Persyaratan 1.5). Ketika negara telah menyelesaikan langkah-langkah ini dan ingin diakui sebagai negara pelaksana EITI, pemerintah harus mengajukan permohonan EITI kepada Dewan EITI (lihat di bawah).

Negara-negara yang bersiap untuk bergabung dengan EITI didorong untuk mengidentifikasi potensi hambatan terhadap pengungkapan secara sistematis sedari awal, misalnya dengan melakukan studi kelayakan pengungkapan sistematis atau memanfaatkan peluang untuk pengungkapan sistematis sebagai bagian dari persiapan untuk menjadi negara pelaksana EITI.

Bagaimana menjadi negara pelaksana EITI

Ketika suatu negara telah menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran dan ingin diakui sebagai negara pelaksana EITI, pemerintah harus mengajukan permohonan EITI yang disetujui oleh kelompok pemangku kepentingan multi-pihak EITI.¹ Permohonan tersebut harus menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan hingga saat ini dan menyediakan bukti yang menunjukkan bahwa setiap langkah pendaftaran telah diselesaikan. Permohonan tersebut harus mencakup detail kontak untuk pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang terlibat dalam EITI.

Setelah diajukan, permohonan akan diumumkan secara terbuka di situs web EITI. Dewan EITI akan meninjau permohonan dan menilai apakah langkah-langkah pendaftaran telah diselesaikan. Sekretariat Internasional EITI akan bekerja sama erat dengan pejabat tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memimpin implementasi EITI guna menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan. Berdasarkan hal ini dan informasi lain yang tersedia, Komite Penyebaran dan Pencalonan Dewan EITI akan memberikan rekomendasi kepada Dewan EITI dalam waktu yang wajar mengenai apakah permohonan suatu negara seharusnya diterima. Dewan EITI akan menjadi pihak yang mengambil keputusan akhir.

Dewan EITI akan memproses permohonan dalam waktu delapan minggu setelah menerima permohonan. Dewan EITI lebih memilih untuk mengambil keputusan terkait penerimaan suatu negara dalam rapat Dewan EITI, meskipun dapat pula mempertimbangkan untuk mengambil keputusan melalui surat edaran Dewan antara rapat jika dianggap perlu.

Ketika Dewan EITI menerima suatu negara sebagai negara pelaksana EITI, Dewan EITI juga akan menetapkan batas waktu untuk menerbitkan Laporan EITI pertama dan melakukan Validasi. Pengungkapan EITI pertama suatu negara pelaksana harus tersedia

dalam waktu 18 bulan sejak tanggal negara tersebut diterima. Validasi akan dimulai dalam waktu dua setengah tahun sejak menjadi negara pelaksana EITI. Informasi lebih lanjut mengenai batas waktu pelaporan dan Validasi (termasuk ruang lingkup perpanjangan batas waktu tersebut) dijelaskan dalam “Pengawasan Dewan EITI” pada Bagian 2 Standar EITI.

1 Formulir aplikasi standar tersedia dari Sekretariat Internasional EITI.

BAGIAN 3

Persyaratan EITI

Bagian ini menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh negara-negara pelaksana EITI dan perusahaan ekstraktif yang beroperasi di negara tersebut.

Standar EITI 2023 memperkenalkan sejumlah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak transisi energi terhadap sektor minyak, gas, dan pertambangan, serta untuk mendukung perumusan kebijakan. Standar ini memperkuat persyaratan yang bertujuan untuk mengatasi risiko korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan memajukan kesetaraan gender.

Kelompok multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholder group/MSG) berperan penting dalam memastikan bahwa implementasi EITI menangani tantangan tata kelola sektor ekstraktif paling signifikan di setiap negara pelaksana EITI. Persyaratan EITI merupakan persyaratan minimum, dan negara pelaksana didorong untuk melampaui persyaratan tersebut apabila para pemangku kepentingan menilai bahwa hal itu tepat. Pemangku kepentingan juga didorong untuk merujuk panduan tambahan terkait implementasi Persyaratan EITI yang tersedia di eiti.org/guide.

Terminologi

Persyaratan wajib

Istilah “**diwajibkan**” dan “**harus**” dalam Standar EITI menunjukkan bahwa persyaratan tersebut bersifat wajib dan akan diperhitungkan dalam penilaian kemajuan pemenuhan Standar EITI.

Persyaratan yang diharapkan

Istilah “**diharapkan**” dalam Standar EITI menunjukkan bahwa MSG perlu mempertimbangkan isu tersebut dan mendokumentasikan pembahasannya, alasan pengungkapan/tidak pengungkapan, serta hambatan terhadap pengungkapan. Proses Validasi akan mempertimbangkan dan mendokumentasikan pembahasan tersebut.

Persyaratan yang dianjurkan

Istilah “**dianjurkan**” dan “**dapat**” dalam Standar EITI menunjukkan bahwa persyaratan tersebut bersifat opsional. Upaya MSG akan didokumentasikan dalam Validasi tetapi tidak akan memengaruhi penilaian keseluruhan atas kemajuan pemenuhan Standar EITI.

Pengungkapan sistematis

Istilah “**pengungkapan sistematis**” merujuk pada pengungkapan informasi yang dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan dapat diakses publik melalui situs web pemerintah dan perusahaan, jurnal resmi, atau publikasi lainnya. Data yang diungkapkan secara sistematis dipublikasikan oleh entitas yang bertanggung jawab atas data tersebut melalui platform resmi pemerintah atau perusahaan (“dari sumbernya langsung”). Ini dapat mencakup: daftar perizinan, kontrak, perusahaan dan pemilik manfaat (*beneficial owners*); pelaporan keuangan publik; laporan keuangan tahunan; serta portal data terbuka. Pengungkapan sistematis merupakan ekspektasi utama, sementara Laporan EITI digunakan untuk memberikan konteks

tambahan; mengumpulkan sumber informasi yang telah diungkapkan secara sistematis; dan mengatasi kesenjangan maupun isu kualitas data. Persyaratan pengungkapan EITI dapat dipenuhi dengan merujuk informasi yang telah tersedia untuk publik dan/atau data yang dikumpulkan dalam rangka implementasi EITI.

PERSYARATAN 1

Pengawasan oleh pemangku kepentingan multi-pihak

EITI mensyaratkan adanya pengawasan pemangku kepentingan multi-pihak yang efektif, termasuk sebuah kelompok multi-pemangku kepentingan yang berfungsi dengan keterlibatan penuh, aktif, dan efektif dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil.

1.1 Keterlibatan pemerintah

Tujuan dari persyaratan ini adalah memastikan adanya kepemimpinan pemerintah yang penuh, aktif, dan efektif dalam implementasi EITI, baik melalui kepemimpinan politik tingkat tinggi maupun keterlibatan operasional, guna memfasilitasi seluruh aspek implementasi.

- a) Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan pernyataan publik yang tegas mengenai niatnya untuk melaksanakan EITI. Pernyataan harus dibuat oleh kepala negara atau pemerintahan, atau pejabat pemerintah yang diberikan mandat sesuai ketentuan.
- b) Pemerintah diwajibkan menunjuk seorang pejabat senior untuk memimpin implementasi EITI. Pejabat ini harus dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan EITI lintas kementerian/lembaga, serta mampu menggalang sumber daya untuk pelaksanaan EITI.
- c) Pemerintah harus terlibat sepenuhnya, aktif, dan secara efektif dalam proses EITI.
- d) Pemerintah harus memastikan bahwa pejabat pemerintah tingkat senior terwakili dalam pemangku kepentingan multi-pihak.

1.2 Keterlibatan perusahaan

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan ekstraktif terlibat sepenuhnya, aktif, dan efektif dalam EITI, baik dalam hal pengungkapan informasi maupun partisipasi dalam pekerjaan pemangku kepentingan multi-pihak, dan bahwa pemerintah memastikan lingkungan yang mendukung untuk hal ini. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan pelapor yang terlibat dalam EITI menyelaraskan praktik mereka dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana tercantum dalam Ekspektasi untuk Perusahaan Pendukung EITI.²

- a) Perusahaan harus terlibat secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI.
- b) Perusahaan pelapor diharapkan mempublikasikan kebijakan anti-korupsi yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola risiko korupsi, termasuk penggunaan data pemilik manfaat. Selain itu, perusahaan yang duduk di MSG diharapkan menerapkan proses uji tuntas yang ketat. Perusahaan pelapor lainnya juga dianjurkan menerapkan proses uji tuntas yang ketat.
- c) Pemerintah diwajibkan memastikan bahwa terdapat lingkungan yang mendukung partisipasi perusahaan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun praktik pelaksanaan EITI. Hak-hak mendasar perwakilan perusahaan yang terlibat substansial dalam EITI, termasuk namun tidak

terbatas pada anggota MSG, harus dihormati.

- d) Pemerintah diwajibkan memastikan tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses EITI.

2 Lihat Ekspektasi untuk Perusahaan Pendukung EITI (Bagian 4 dari Bagian 1 Standar EITI).

1.3 Keterlibatan masyarakat sipil

Tujuan dari persyaratan ini adalah memastikan bahwa masyarakat sipil terlibat secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI, serta bahwa terdapat iklim kondusif guna mendukung hal tersebut. Partisipasi masyarakat sipil yang aktif dalam proses EITI merupakan kunci untuk memastikan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh EITI dapat mendorong akuntabilitas yang lebih besar dan meningkatkan tata kelola sumber daya minyak, gas, dan mineral. Ketentuan terkait keterlibatan masyarakat sipil ini bertujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan hal tersebut berjalan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Sesuai dengan Protokol: Partisipasi masyarakat sipil:³

- a) Masyarakat sipil harus terlibat secara penuh, aktif, dan efektif dalam proses EITI.
- b) Pemerintah diwajibkan memastikan adanya iklim kondusif yang mendukung partisipasi masyarakat sipil, baik dalam peraturan perundang-undangan, regulasi, maupun praktik pelaksanaan EITI. Hak-hak mendasar anggota masyarakat sipil yang terlibat secara mendalam dalam EITI, termasuk namun tidak terbatas pada anggota pemangku kepentingan multi-pihak, harus dihormati.
- c) Pemerintah diwajibkan memastikan tidak ada hambatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses EITI.
- d) Pemerintah harus menahan diri dari tindakan yang dapat mempersempit atau membatasi debat publik terkait implementasi EITI.
- e) Pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada anggota pemangku kepentingan, harus:
 - i. Dapat berbicara secara bebas mengenai isu transparansi dan tata kelola sumber daya alam.
 - ii. Terlibat secara mendalam dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses EITI, serta memastikan bahwa proses tersebut berkontribusi pada debat publik.
 - iii. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain.
 - iv. Dapat beroperasi secara bebas dan menyampaikan pandangan mengenai EITI tanpa pembatasan, tekanan, atau tindakan pembalasan.
- f) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak diharapkan memantau kepatuhan terhadap *Protokol: Partisipasi masyarakat sipil*, dan mendokumentasikan pembahasannya terkait setiap kekurangan yang diidentifikasi serta langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya.

1.4 Kelompok multi-pihak

Tujuan dari persyaratan ini adalah memastikan terbentuknya kelompok pemangku kepentingan multi-pihak yang independen dan mampu menjalankan pengawasan aktif serta bermakna atas seluruh aspek implementasi EITI, dengan menyeimbangkan kepentingan tiga konstituensi utama (pemerintah, industri, dan

masyarakat sipil), serta mengambil keputusan secara mufakat. Sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan ini, pemangku kepentingan multi-pihak harus memiliki representasi yang memadai dari pemangku kepentingan utama yang ditunjuk melalui prosedur konstituensi yang terbuka, adil, dan transparan; mengambil keputusan secara inklusif; serta melaporkan kepada konstituensi yang lebih luas.

3 Lihat *Protocol: Participation of civil society* (Bagian 5 pada Bagian 1 Standar EITI).

- a) Pemerintah diwajibkan berkomitmen bekerja sama dengan masyarakat sipil dan perusahaan, serta membentuk pemangku kepentingan multi-pihak untuk mengawasi implementasi EITI. Dalam membentuk kelompok pemangku kepentingan multi-pihak, pemerintah harus:
 - i. Memastikan bahwa undangan untuk berpartisipasi dalam pemangku kepentingan multi-pihak bersifat terbuka dan transparan.
 - ii. Memastikan pemangku kepentingan terwakili secara memadai. Hal ini tidak berarti bahwa jumlah wakil harus sama banyak. Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus terdiri dari pemangku kepentingan yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada sektor swasta; masyarakat sipil (termasuk kelompok masyarakat sipil independen, media, dan serikat pekerja); serta entitas pemerintah yang relevan, termasuk anggota parlemen apabila diperlukan. Setiap kelompok pemangku kepentingan harus memiliki hak untuk menunjuk perwakilannya sendiri, dengan mempertimbangkan representasi yang plural dan beragam. Proses pencalonan harus dilakukan secara independen dan bebas dari indikasi tekanan. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam EITI sebagai anggota kelompok multi-pemangku kepentingan harus independen dari pemerintah dan/atau perusahaan, baik secara operasional maupun kebijakan. Pemangku kepentingan multi-pihak dan setiap konstituensi harus mempertimbangkan keseimbangan gender dalam representasinya untuk semakin mewujudkan kesetaraan gender.
 - iii. Mempertimbangkan pembentukan dasar hukum bagi kelompok multi-pihak.
- b) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak diwajibkan menyepakati Kerangka Acuan Kerja (ToR) publik yang jelas terkait tugasnya. ToR tersebut setidaknya perlu mencakup ketentuan mengenai:

Peran, tanggung jawab, dan hak pemangku kepentingan multi-pihak:

- i. Anggota pemangku kepentingan multi-pihak harus memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya.
- ii. Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak diwajibkan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang efektif kepada kelompok masyarakat sipil dan perusahaan, termasuk melalui media, situs web, dan surat, untuk menginformasikan komitmen pemerintah dalam melaksanakan EITI, serta peran sentral perusahaan dan masyarakat sipil. Kelompok multi-pihak juga diwajibkan menyebarluaskan informasi publik yang dihasilkan dari proses EITI secara luas.
- iii. Anggota pemangku kepentingan multi-pihak diwajibkan berkoordinasi dengan kelompok konstitusinya masing-masing.
- iv. Anggota pemangku kepentingan multi-pihak diharapkan mematuhi kode etik *EITI Association Code of Conduct*.

Persetujuan rencana kerja dan pengawasan implementasi:

- v. Kelompok multi-pihak diwajibkan menyetujui rencana kerja tahunan

sesuai dengan Persyaratan 1.5.

- vi. Kelompok multi-pihak diwajibkan mengawasi proses pelaporan EITI dan berpartisipasi dalam Validasi.
- vii. Kelompok multi-pihak diwajibkan mempertimbangkan isu-isu terkait tata kelola industri ekstraktif, termasuk kegiatan pendukung terkait anti-korupsi; reformasi transisi energi; kesetaraan gender; serta pertambangan skala kecil dan pertambangan rakyat (bila relevan).

Aturan dan prosedur tata kelola internal:

- viii. Proses pengambilan keputusan dalam EITI harus bersifat inklusif sepanjang implementasinya, dengan setiap konstituensi diperlakukan sebagai mitra. Setiap anggota pemangku kepentingan multi-pihak memiliki hak untuk mengajukan isu untuk dibahas. Pemangku kepentingan multi-pihak diwajibkan menyepakati dan mempublikasikan prosedur untuk mencalonkan dan mengganti perwakilan, proses pengambilan keputusan, durasi mandat, dan frekuensi pertemuan. Ini mencakup adanya proses penggantian anggota yang menghormati prinsip-prinsip dalam Persyaratan 1.4(a). Jika terdapat praktik pemberian uang harian (*per diem*) dalam menghadiri rapat EITI atau pembayaran lain kepada anggota, praktik tersebut harus transparan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- ix. Pengumuman pertemuan harus disampaikan jauh hari sebelumnya, dan dokumen harus diedarkan tepat waktu sebelum dibahas dan diadopsi.
- x. Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus menyimpan dan mengumumkan catatan tertulis mengenai pembahasan dan keputusannya.

1.5 Rencana kerja, pemantauan, dan peninjauan

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk membangun siklus perencanaan kerja dan pemantauan yang bersifat konsultatif guna memastikan relevansi dan akuntabilitas pelaksanaan EITI bagi para pemangku kepentingan nasional, sehingga EITI dapat mencapai hasil dan dampak yang relevan.

- a) Kelompok multi-pemangku kepentingan wajib menyusun dan memelihara rencana kerja pelaksanaan. Rencana kerja tersebut harus mencakup isu-isu paling relevan dalam tata kelola sumber daya alam sesuai dengan prioritas nasional. Rencana kerja harus mencakup:
 - i. Tujuan pelaksanaan EITI yang mencerminkan prioritas nasional, termasuk isu terkait korupsi; kesetaraan gender; transisi energi; penerimaan negara; pertambangan skala kecil dan artisanal (jika relevan); serta isu-isu utama tata kelola sektor ekstraktif lainnya, beserta konsultasi dengan pemangku kepentingan utama.
 - ii. Kegiatan yang terukur dan berbatas waktu untuk mencapai tujuan yang disepakati dan menindaklanjuti rekomendasi dari Validasi dan pelaporan.
 - iii. Penjelasan mengenai persyaratan EITI mana yang diprioritaskan, serta deskripsi mengenai kegiatan dalam rencana kerja yang berkontribusi pada pemenuhan setiap persyaratan.
 - iv. Anggaran yang dihitung secara lengkap beserta sumber pendanaannya.
- b) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak wajib melakukan peninjauan kemajuan tahunan atas rencana kerja, yang kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja berikutnya. Peninjauan kemajuan tersebut harus mencakup:
 - i. Kemajuan dan tantangan dalam mencapai tujuan rencana kerja; perubahan

atas tujuan tersebut; serta bagaimana pelaksanaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan secara lebih efektif.

- ii. Gambaran kegiatan dan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan EITI.
 - iii. Deskripsi mekanisme bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan EITI, beserta dokumentasi pandangan para pemangku kepentingan.
 - iv. Dokumentasi mengenai bagaimana kelompok multi-pemangku kepentingan mempertimbangkan aspek gender dan inklusivitas.
 - v. Laporan realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran dalam rencana kerja.
- c) Seluruh kegiatan perencanaan, pemantauan, dan peninjauan harus didasarkan pada konsultasi dengan pemangku kepentingan nasional dan didokumentasikan dalam format yang tersedia untuk publik.
 - d) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan mempertimbangkan cara untuk mengukur kemajuan kegiatan secara berkelanjutan, termasuk evaluasi apakah kegiatan tahun sebelumnya berkontribusi pada peningkatan tata kelola sektor ekstraktif.
 - e) Jika relevan, pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan memberikan penjelasan apabila mereka telah mempertimbangkan kasus-kasus korupsi yang diketahui publik di sektor tersebut yang memiliki relevansi nasional pada tahun pelaporan, serta mendokumentasikan diskusi, respons, dan rekomendasinya.

PERSYARATAN 2

Kerangka hukum dan kelembagaan, kontrak, dan izin

EITI mewajibkan pengungkapan mengenai bagaimana sektor ekstraktif dikelola, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami hukum dan prosedur pemberian hak eksplorasi dan produksi; kerangka hukum, regulasi, dan kontraktual yang berlaku bagi sektor ekstraktif; serta tanggung jawab kelembagaan negara dalam mengelola sektor tersebut.

2.1 Kerangka hukum dan rezim fiskal

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan pemahaman publik atas seluruh aspek kerangka regulasi industri ekstraktif, termasuk kerangka hukum; rezim fiskal; peran entitas pemerintah dan reformasi; serta peraturan terkait upaya pencegahan risiko korupsi di sektor ekstraktif.

- a) Negara pelaksana wajib mengungkapkan deskripsi kerangka hukum dan rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif. Informasi ini harus mencakup ringkasan rezim fiskal, termasuk tingkat devolusi fiskal; gambaran umum hukum dan regulasi yang terkait, termasuk hukum terkait pencegahan korupsi di sektor ekstraktif; deskripsi jenis kontrak dan izin yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan mineral; serta informasi mengenai peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah terkait.
- b) Negara pelaksana wajib mengungkapkan gambaran komitmen, kebijakan, dan rencana transisi energi nasional yang relevan bagi industri ekstraktif.
- c) Negara pelaksana dianjurkan mengungkapkan ringkasan mekanisme harga karbon atau pajak karbon yang penting bagi industri ekstraktif.
- d) Negara pelaksana dianjurkan mengungkapkan subsidi pemerintah dan bentuk dukungan negara lainnya yang penting bagi industri ekstraktif, serta reformasi yang sedang berlangsung. Ini dapat mencakup subsidi produsen serta subsidi pra-pajak dan pasca-pajak untuk konsumen, sesuai dengan panduan *Global Subsidies Initiative*. Subsidi yang dikategorikan sebagai pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN harus diungkapkan sesuai Persyaratan 6.2.
- e) Jika pemerintah sedang melakukan reformasi terkait komitmen, kebijakan, dan rencana transisi energi nasional, pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan untuk mendokumentasikannya.
- f) Apabila diperlukan, negara pelaksana dianjurkan mengungkapkan kebijakan terkait sektor pertambangan skala kecil dan artisanal, serta informasi terkait rencana reformasi atau yang sedang berlangsung.

2.2 Alokasi kontrak dan izin

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menyediakan gambaran bagi publik tentang pemberian dan pengalihan izin minyak, gas, dan pertambangan; prosedur pemberian izin yang berlaku; serta apakah prosedur tersebut dijalankan sesuai praktik di lapangan. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kelemahan dalam proses alokasi izin, termasuk yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap korupsi.

- a) Negara pelaksana wajib mengungkapkan informasi terkait seluruh pemberian dan pengalihan kontrak dan izin yang terjadi selama periode pelaporan EITI terbaru, termasuk untuk perusahaan dengan pembayaran di bawah ambang materialitas. Informasi ini harus mencakup:
- i. Deskripsi proses pengalihan atau pemberian izin.
 - ii. Kriteria teknis dan finansial yang digunakan, termasuk persyaratan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC). Jika proses pemberian atau pengalihan izin mewajibkan konsultasi dengan masyarakat terdampak, negara pelaksana dan perusahaan diharapkan mengungkapkan deskripsi mengenai bagaimana proses konsultasi dilakukan. Ini dapat mencakup jumlah orang yang dikonsultasikan, dipilih berdasarkan jenis kelamin, dan ringkasan bagaimana berbagai sudut pandang mengenai dampak proyek dikumpulkan dan dipertimbangkan.
 - iii. Informasi mengenai penerima izin yang dialihkan atau diberikan, termasuk anggota konsorsium (jika ada).
 - iv. Setiap penyimpangan nyata dari kerangka hukum dan regulasi yang berlaku terkait pengalihan dan pemberian izin, termasuk penjelasan mengenai metodologi yang digunakan dalam penilaian.

Jika pemerintah dapat memilih metode berbeda dalam pemberian kontrak atau izin (misalnya lelang kompetitif atau negosiasi langsung), pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan menyertakan penjelasan mengenai aturan yang menentukan prosedur yang dipilih dan alasan pemilihan prosedur tersebut. Ini mencakup situasi ketika pemerintah menggunakan proses pemberian atau pengalihan yang dipercepat atau “jalur cepat.” Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus mendokumentasikan secara jelas alasan pemilihan; proses pemberian atau pengalihan yang menggunakan prosedur tersebut; prosedur dan kriteria yang digunakan; lembaga yang terlibat; serta hasil dari proses tersebut.

Jika terdapat kekurangan dalam informasi yang tersedia untuk masyarakat, kekurangan tersebut harus diidentifikasi dengan jelas. Setiap hambatan hukum atau praktis yang signifikan yang menghalangi pengungkapan komprehensif atas informasi di atas harus didokumentasikan dan dijelaskan, termasuk rencana pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut dan perkiraan waktunya.

- b) Jika perusahaan memegang izin yang diberikan sebelum periode pelaporan EITI, negara pelaksana dianjurkan mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan 2.2(a).
- c) Jika izin diberikan melalui proses lelang, pemerintah wajib mengungkapkan daftar peserta lelang, termasuk pemilik manfaatnya sesuai Persyaratan 2.5, serta kriteria penilaian lelang.
- d) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan menyertakan informasi tambahan mengenai alokasi izin dalam pengungkapan EITI. Ini dapat mencakup komentar mengenai efisiensi dan efektivitas prosedur perizinan; deskripsi prosedur, praktik di lapangan, dan alasan perpanjangan, penangguhan, atau pencabutan kontrak/izin; serta informasi mengenai perubahan kepemilikan mayoritas perusahaan pemegang izin.

2.3 Daftar izin

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan keterbukaan akses publik terhadap informasi yang komprehensif mengenai hak atas properti yang terkait dengan deposit dan proyek ekstraktif.

- TERMINOLOGI**
- a) Istilah “izin” dalam konteks ini merujuk pada setiap izin, sewa, hak milik, persetujuan, kontrak, atau konsesi di mana pemerintah memberikan kepada perusahaan(-perusahaan) atau orang(perorangan) hak untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya minyak, gas, dan/atau mineral.
- b) Negara-negara yang menerapkan EITI diwajibkan untuk menjaga daftar publik atau sistem kadastral yang berisi informasi yang tepat waktu dan komprehensif mengenai setiap izin yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dalam lingkup implementasi EITI yang disepakati:
- Pemegang izin.
 - Koordinat area izin, jika telah dihimpun. Jika koordinat tidak dihimpun, pemerintah wajib memastikan bahwa ukuran dan lokasi area izin diungkapkan dalam daftar izin, dan bahwa koordinat tersedia secara publik melalui lembaga pemerintah yang relevan tanpa biaya atau pembatasan yang tidak wajar. Pengungkapan harus mencakup panduan mengenai cara mengakses koordinat serta biaya, jika ada, untuk mengakses data tersebut. Pemerintah juga harus mendokumentasikan rencana dan jadwal untuk menyediakan informasi ini secara gratis dan elektronik melalui daftar izin.
 - Tanggal pengajuan, tanggal pemberian, dan jangka waktu izin.
 - Untuk izin produksi, komoditas yang diproduksi.
- Daftar atau kadaster izin diharapkan mencakup informasi mengenai izin yang dimiliki seluruh entitas, termasuk perusahaan dan individu atau kelompok yang berada di luar cakupan EITI (misalnya karena pembayaran mereka berada di bawah ambang materialitas). Setiap hambatan hukum atau praktis yang besar yang menghalangi pengungkapan secara menyeluruh harus didokumentasikan dan dijelaskan, termasuk rencana pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut dan perkiraan waktu penyelesaiannya.
- c) Jika daftar atau kadaster tersebut tidak tersedia atau tidak lengkap, kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus mengungkapkan setiap kekurangan dalam informasi yang tersedia untuk publik, serta mendokumentasikan upaya untuk memperkuat sistem tersebut.
- d) Negara pelaksana dianjurkan menghubungkan daftar izin yang tersedia untuk publik dengan platform pemerintah lainnya yang memuat atau mengungkapkan informasi sesuai Persyaratan 2.5 mengenai pemilik legal dan pemilik manfaat dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan.

2.4 Kontrak dan lisensi

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan keterbukaan akses publik terhadap seluruh izin dan kontrak yang menjadi dasar kegiatan ekstraktif (setidaknya sejak 2021) guna memungkinkan publik memahami hak dan kewajiban kontraktual perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif, serta untuk memastikan bahwa pengungkapan kontrak mendukung kemampuan pemangku kepentingan dalam memantau kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual.

- a) Negara pelaksana wajib mengungkapkan seluruh kontrak dan izin yang diberikan, ditandatangani, atau diubah sejak 1 Januari 2021.

Negara pelaksana juga dianjurkan mengungkapkan secara publik kontrak dan izin yang memuat ketentuan terkait eksploitasi minyak, gas, dan mineral, serta kontrak-kontrak eksplorasi material.

- b) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak diharapkan menyepakati dan mengumumkan rencana pengungkapan kontrak, dengan kerangka waktu yang jelas untuk pelaksanaannya dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan secara menyeluruh. Rencana ini akan diintegrasikan ke dalam rencana kerja sejak 2020 ke depan.
- c) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak wajib mendokumentasikan kebijakan pemerintah mengenai pengungkapan kontrak dan izin yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan mineral. Dokumentasi ini harus mencakup:
- Deskripsi apakah peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah mengatur pengungkapan kontrak dan izin, termasuk apakah pengungkapan tersebut diwajibkan atau dilarang. Jika tidak terdapat peraturan yang relevan, harus dijelaskan di mana kebijakan pemerintah tersebut termuat, dan kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus mendokumentasikan diskusi mengenai apa yang dianggap sebagai kebijakan pemerintah terkait pengungkapan kontrak. Setiap reformasi yang relevan dengan pengungkapan kontrak dan izin, baik yang direncanakan maupun yang sedang berlangsung, harus didokumentasikan.
 - Gambaran mengenai kontrak dan izin mana saja yang tersedia untuk publik. Negara pelaksana wajib menyediakan daftar seluruh kontrak dan izin eksplorasi dan produksi yang aktif, dengan penjelasan mana yang tersedia untuk publik dan mana yang tidak. Untuk setiap kontrak atau izin yang dipublikasikan, daftar tersebut harus mencantumkan referensi atau tautan ke lokasi penerbitannya. Jika kontrak atau izin tidak dipublikasikan, hambatan hukum atau praktis harus didokumentasikan dan dijelaskan.
 - Jika praktik pengungkapan berbeda dari persyaratan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah mengenai keterbukaan kontrak dan izin, pemangku kepentingan multi-pihak harus menjelaskan penyebab perbedaan tersebut.

TERMINOLOGI

- d) Istilah “kontrak” dalam Persyaratan 2.4(a) berarti:
- Naskah lengkap setiap kontrak, konsesi, perjanjian bagi hasil, atau perjanjian lain yang diberikan atau ditandatangani pemerintah yang memuat ketentuan terkait eksploitasi sumber daya minyak, gas, dan mineral.
Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus menentukan kontrak eksplorasi mana yang perlu diungkapkan berdasarkan materialitas dan aspek praktis.

ISTILAH
 (lanjutan)

- ii. Naskah lengkap setiap lampiran, adendum, atau tambahan yang memuat rincian yang relevan dengan hak eksploitasi, dan hak eksplorasi material, sebagaimana dimaksud dalam 2.4(d)(i), atau pelaksanaannya.
 Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus menyepakati dan mendokumentasikan apa yang dianggap sebagai lampiran, adendum, atau tambahan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan nasional dan konteks negara.
 - iii. Naskah lengkap setiap perubahan atau amandemen terhadap dokumen yang disebut dalam 2.4(d)(i) dan 2.4(d)(ii).
- e) Istilah “izin” dalam Persyaratan 2.4(a) berarti:
- i. Naskah lengkap setiap izin, sewa, hak, atau persetujuan yang memberikan kepada perusahaan atau individu hak untuk mengeksploitasi sumber daya minyak, gas, dan/atau mineral.
 Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus menentukan izin eksplorasi mana yang perlu diungkapkan berdasarkan materialitas dan aspek praktis.
 - ii. Naskah lengkap setiap lampiran, adendum, atau tambahan yang memuat rincian yang relevan dengan hak eksploitasi, dan hak eksplorasi material, sebagaimana dimaksud dalam 2.4(e)(i), atau pelaksanaannya.
 Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak harus menyepakati dan mendokumentasikan apa yang dianggap sebagai lampiran, adendum, atau tambahan, berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan nasional dan konteks negara.
 - iii. Teks lengkap setiap perubahan atau amandemen terhadap dokumen yang disebut dalam 2.4(e)(i) dan 2.4(e)(ii).

2.5 Pemilik manfaat (Beneficial ownership)

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memungkinkan publik mengetahui siapa yang pada akhirnya memiliki dan mengendalikan perusahaan yang beroperasi di sektor ekstraktif, khususnya perusahaan yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi oleh kelompok pemangku kepentingan multi-pihak, guna mencegah praktik yang tidak semestinya dan korupsi dalam pengelolaan sumber daya ekstraktif serta membantu memantau kepemilikan oleh pejabat publik yang berpengaruh (politically exposed persons).

- a) Negara pelaksana dianjurkan menyimpan daftar yang bisa diakses publik yang berisikan pemilik manfaat dari entitas korporasi yang mengajukan atau memegang kepemilikan partisipasi dalam izin atau kontrak eksplorasi maupun produksi minyak, gas, atau pertambangan, termasuk identitas pemilik manfaat; tingkat kepemilikan; serta rincian mengenai bagaimana kepemilikan atau pengawasan dilakukan. Jika memungkinkan, negara pelaksana dianjurkan memasukkan informasi pemilik manfaat ke dalam dokumen yang sudah disampaikan perusahaan kepada regulator korporasi, bursa efek, atau lembaga yang mengatur perizinan industri ekstraktif. Jika informasi tersebut sudah tersedia untuk publik, Laporan EITI harus memberikan panduan mengenai cara mengaksesnya.

- b) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak wajib mendokumentasikan kebijakan pemerintah dan pembahasannya mengenai pengungkapan pemilik manfaat. Dokumentasi ini harus memuat ketentuan hukum yang relevan, praktik pengungkapan yang berjalan, serta reformasi yang direncanakan atau sedang berlangsung terkait pengungkapan pemilik manfaat.
- c) Negara pelaksana wajib meminta, dan perusahaan wajib mengungkapkan secara publik, informasi mengenai pemilik manfaat. Ketentuan ini berlaku bagi entitas korporasi yang mengajukan atau memegang kepemilikan partisipasi dalam izin atau kontrak eksplorasi maupun produksi minyak, gas, atau pertambangan, dan harus mencakup identitas pemilik manfaat; tingkat kepemilikan; serta rincian mengenai bagaimana kepemilikan atau pengawasan dilakukan. Pemangku kepentingan multi-pihak harus mengungkapkan setiap kekurangan atau kelemahan utama dalam pelaporan pemilik manfaat, termasuk entitas yang tidak menyerahkan sebagian atau seluruh informasi pemilik manfaatnya.
- d) Informasi mengenai identitas pemilik manfaat harus mencakup nama pemilik manfaat, kewarganegaraan, dan negara tempat tinggalnya, serta identifikasi jika yang bersangkutan adalah pejabat publik yang berpengaruh. Negara pelaksana juga dianjurkan mengungkapkan nomor identitas nasional pemilik manfaat, tanggal lahir, alamat tempat tinggal atau alamat kantor, dan informasi kontak.
- e) Pemangku kepentingan multi-pihak harus menilai mekanisme yang sudah ada untuk memastikan kebenaran informasi pemilik manfaat, dan menyetujui pendekatan bagi entitas korporasi dalam lingkup Persyaratan 2.5(c) untuk menjamin akurasi informasi yang mereka sampaikan. Ini mungkin meliputi kewajiban bagi perusahaan untuk menandatangani formulir deklarasi pemilik manfaat oleh anggota manajemen senior atau penasihat hukum senior, atau untuk menyerahkan dokumen pendukung.

TERMINOLOGI

- f) Definisi pemilik manfaat (beneficial ownership):
 - i. Istilah “pemilik manfaat” untuk suatu perusahaan berarti orang perseorangan yang secara langsung atau tidak langsung pada akhirnya memiliki atau mengendalikan entitas korporasi.
 - ii. Kelompok multi-pemangku kepentingan harus menyepakati definisi yang tepat untuk istilah “pemilik manfaat”. Definisi tersebut harus selaras dengan Requirement 2.5(f)(i) serta mempertimbangkan norma internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Definisi tersebut juga harus mencakup ambang batas kepemilikan (ownership threshold) yang didasarkan pada konteks negara serta jenis dan tingkat risiko yang ingin ditangani. Negara pelaksana dianjurkan untuk menetapkan ambang batas kepemilikan sebesar 10% atau lebih rendah untuk pelaporan pemilik manfaat. Definisi tersebut juga harus menetapkan kewajiban pelaporan bagi pejabat publik berpengaruh (politically exposed persons/PEPs). Negara pelaksana diwajibkan meminta pengungkapan penuh atas pemilik manfaat PEP, terlepas dari tingkat kepemilikannya.
 - iii. Perusahaan tercatat (*publicly listed companies*), termasuk anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, diwajibkan mengungkapkan nama bursa efek tempat mereka tercatat dan menyertakan tautan ke dokumen yang

disampaikan pada bursa tersebut untuk memudahkan akses publik terhadap informasi pemilik manfaat mereka.

Kelompok multi-pemangku kepentingan didorong untuk meninjau kelengkapan dan kebenaran informasi kepemilikan yang diungkapkan dalam dokumen bursa.

- iv. Dalam hal usaha patungan (*joint ventures*), setiap entitas dalam usaha tersebut harus mengungkapkan pemilik manfaatnya, kecuali apabila entitas tersebut merupakan perusahaan tercatat atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan tercatat. Setiap entitas bertanggung jawab atas akurasi informasi yang disampaikan.
- v. Badan usaha milik negara (BUMN/SOEs) diwajibkan mengungkapkan nama negara yang memiliki atau mengendalikan BUMN tersebut, tingkat kepemilikannya, dan rincian mengenai bagaimana kepemilikan atau kontrol tersebut dijalankan. Jika BUMN tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, informasi pemilik manfaat wajib diungkapkan sesuai dengan Requirement 2.5(c).
- g) Negara pelaksana diwajibkan mengungkapkan pemilik legal dari entitas korporasi sebagaimana didefinisikan dalam Requirement 2.5(c), termasuk porsi kepemilikannya. Perusahaan dianjurkan mengungkapkan struktur kepemilikan mereka, termasuk rantai lengkap entitas legal yang mengarah pada pemilik manfaat.

2.6 Partisipasi negara

Tujuan dari persyaratan ini adalah memastikan mekanisme yang efektif untuk transparansi dan akuntabilitas bagi BUMN serta partisipasi negara secara lebih luas, melalui pemahaman publik mengenai apakah pengelolaan BUMN dilaksanakan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku. Informasi ini menjadi dasar bagi peningkatan berkelanjutan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, baik secara finansial, ekonomi, maupun sosial, serta memperkuat pemahaman tentang sejauh mana keputusan investasi BUMN selaras dengan kepentingan publik jangka panjang.

- a) Apabila partisipasi negara dalam industri ekstraktif menimbulkan pembayaran penerimaan yang material, negara pelaksana diwajibkan mengungkapkan:
 - i. Penjelasan mengenai peran BUMN dalam sektor tersebut serta ketentuan dan praktik yang berlaku terkait hubungan keuangan antara pemerintah dan BUMN (termasuk ketentuan dan praktik mengenai transfer dana antara BUMN dan negara; laba ditahan; reinvestasi; dan pembiayaan pihak ketiga). Hal ini harus mencakup pengungkapan mengenai transfer, laba ditahan, reinvestasi, dan pembiayaan pihak ketiga terkait usaha patungan dan anak perusahaan BUMN.

TERMINOLOGI

Untuk tujuan implementasi EITI, BUMN adalah perusahaan yang sepenuhnya atau mayoritas dimiliki oleh pemerintah dan terlibat dalam kegiatan ekstraktif atas nama pemerintah.

Berdasarkan hal ini, kelompok multi-pihak didorong untuk mendiskusikan dan mendokumentasikan definisi BUMN mereka, dengan mempertimbangkan undang-undang nasional dan struktur pemerintah.

- ii. Pengungkapan dari pemerintah dan BUMN mengenai tingkat kepemilikan mereka di perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang beroperasi di sektor tersebut, termasuk yang dimiliki melalui anak perusahaan dan usaha patungan BUMN, serta setiap perubahan tingkat kepemilikan selama periode pelaporan

Informasi ini harus mencakup rincian mengenai syarat-syarat yang terkait dengan kepemilikan saham mereka, termasuk tingkat tanggung jawab mereka dalam menanggung biaya pada berbagai fase siklus proyek (misalnya, *full-paid equity*, *free equity*, atau *carried interest*).

Jika terjadi perubahan tingkat kepemilikan pemerintah dan BUMN selama periode pelaporan EITI, pemerintah dan BUMN diharapkan untuk mengungkapkan syarat-syarat transaksi, termasuk rincian mengenai penilaian dan penerimaan.

Jika pemerintah dan BUMN telah memberikan pinjaman atau jaminan pinjaman kepada perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang beroperasi di dalam negeri, rincian transaksi tersebut harus diungkapkan, termasuk jangka waktu pinjaman dan syarat-syaratnya (misalnya jadwal pembayaran dan suku bunga). Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak didorong untuk mempertimbangkan perbandingan syarat pinjaman tersebut dengan syarat pinjaman komersial.

- b) BUMN diwajibkan untuk mengungkap secara publik laporan keuangan yang diaudit, atau pos keuangan utama (neraca, laporan laba/rugi, arus kas) jika laporan keuangan tidak tersedia. Hambatan hukum dan regulasi yang menghambat pengungkapan tepat waktu laporan keuangan yang diaudit harus didokumentasikan secara jelas oleh entitas pelapor.
- c) Negara pelaksana diwajibkan menjelaskan aturan dan praktik yang berkaitan dengan belanja operasional dan modal BUMN, pengadaan, subkontrak, serta tata kelola perusahaan (misalnya komposisi dan penunjukan Dewan Direksi, mandat Dewan Direksi, dan kode etik).

Sesuai dengan Ekspektasi 7 untuk perusahaan pendukung EITI, BUMN diharapkan menerbitkan kebijakan anti-korupsi dan didorong untuk terlibat dalam proses uji tuntas (*due diligence*) secara ketat.

- d) Jika relevan, BUMN didorong untuk mengungkap investasi di sektor ekstraktif (termasuk aset dan liabilitas). BUMN juga didorong untuk mengungkap bagaimana keputusan investasi mereka selaras dengan pertimbangan transisi energi dan risiko iklim.
- e) Jika memungkinkan, BUMN didorong untuk mengungkap identitas dan pemilik manfaat dari agen atau perantara, pemasok, atau kontraktor mereka untuk transaksi-transaksi material.

PERSYARATAN 3

Eksplorasi dan produksi

EITI mengharuskan pengungkapan informasi terkait eksplorasi dan produksi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami potensi sektor tersebut.

3.1 Aktivitas eksplorasi

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan akses publik terhadap gambaran umum sektor ekstraktif di suatu negara dan potensinya, termasuk kegiatan eksplorasi besar yang baru-baru ini dilakukan, sedang berlangsung, dan direncanakan.

- a) Negara-negara yang menerapkan EITI diwajibkan untuk mengungkapkan gambaran umum industri ekstraktif, termasuk setiap kegiatan eksplorasi besar.
- b) Negara dan perusahaan yang melaksanakan program ini didorong untuk mengumumkan data mengenai cadangan minyak, gas, atau mineral yang telah terbukti secara ekonomi, jika tersedia.

3.2 Data produksi

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan pemahaman publik mengenai tingkat produksi komoditas ekstraktif dan penilaian output komoditas ekstraktif, sebagai dasar untuk menilai perkiraan penerimaan negara dari industri ekstraktif dan potensi kebocoran penerimaan negara dari produksi yang belum dilaporkan.

- a) Negara-negara pelaksana diwajibkan untuk mengumumkan data produksi secara tepat waktu, termasuk volume dan nilai produksi berdasarkan komoditas. Data tersebut harus diuraikan lebih lanjut berdasarkan proyek, jika tersedia. Perkiraan produksi yang dihasilkan dari kegiatan rakyat dan skala kecil harus diumumkan jika berlaku dan tersedia.
- b) Sumber dan metode perhitungan volume dan nilai produksi harus diungkapkan. Negara pelaksana diwajibkan untuk mengungkapkan mekanisme yang ada untuk memantau dan memverifikasi keakuratan data produksi serta mendokumentasikan temuan, termasuk kelemahan terkait kelengkapan dan keandalan data produksi yang tersedia secara publik.
- c) Negara pelaksana diharapkan menyajikan data produksi menggunakan standar klasifikasi komoditas nasional dan internasional.
- d) Perusahaan didorong untuk mengungkapkan volume dan nilai penjualan yang terealisasi per proyek.

3.3 Data ekspor

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan pemahaman publik terhadap tingkat ekspor komoditas ekstraktif dan penilaian nilai ekspor komoditas ekstraktif, sebagai dasar untuk menilai perkiraan penerimaan negara yang diharapkan dari industri ekstraktif dan potensi kebocoran penerimaan negara dari ekspor yang dilaporkan secara tidak akurat.

- a) Negara-negara yang menerapkan persyaratan ini diwajibkan untuk mengumumkan data ekspor secara tepat waktu, termasuk volume ekspor, dan nilai ekspor berdasarkan komoditas dan perusahaan eksportir.

Negara pelaksana diharapkan untuk memecah data ekspor berdasarkan transaksi. Perkiraan ekspor yang berasal dari kegiatan rakyat dan skala kecil harus diungkapkan jika berlaku dan tersedia.

- b) Sumber dan metode perhitungan volume dan nilai ekspor harus diungkapkan. Negara pelaksana wajib mengungkapkan mekanisme yang ada untuk memantau dan memverifikasi akurasi data ekspor serta mendokumentasikan temuan, termasuk kelemahan terkait kelengkapan dan keandalan data ekspor yang tersedia secara publik. Hal ini dapat melibatkan analisis kemungkinan perbedaan antara nilai ekspor dan harga pasar, serta/atau nilai impor yang dilaporkan oleh negara tujuan.
- c) Negara pelaksana diharapkan menyajikan data ekspor menggunakan standar klasifikasi komoditas nasional dan internasional.
- d) Perusahaan eksportir dan pembeli komoditas, termasuk pedagang komoditas, didorong untuk mengungkapkan volume dan nilai penjualan yang terealisasi per proyek.
- e) Negara-negara pelaksana didorong untuk menyajikan data ekspor berdasarkan wilayah, tujuan, dan pembeli. Perusahaan eksportir dan negara-negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan apakah pembeli merupakan pihak terkait.

3.4 Emisi gas rumah kaca

- a) Perusahaan didorong untuk mengungkapkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan standar pengungkapan terkini yang sudah ada. Jika memungkinkan, kelompok pemangku kepentingan multi-pihak didorong untuk meminta pengungkapan yang terperinci.

PERSYARATAN 4

Pengumpulan penerimaan negara

Pemahaman tentang pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dapat menjadi dasar pembahasan publik mengenai tata kelola industri ekstraktif. EITI mewajibkan pengungkapan menyeluruh atas pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari industri ekstraktif.

4.1 Pengungkapan komprehensif tentang pajak dan penerimaan negara

Tujuan persyaratan ini adalah memastikan pengungkapan komprehensif tentang pembayaran perusahaan dan/atau penerimaan negara dari minyak, gas, dan pertambangan sebagai dasar pemahaman publik yang rinci tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap penerimaan negara.

- a) Negara-negara yang menerapkan EITI diwajibkan untuk mengungkap seluruh pembayaran material yang dilakukan oleh perusahaan minyak, gas, dan pertambangan kepada pemerintah ("pembayaran") dan/atau semua penerimaan material yang diterima oleh atau atas nama pemerintah dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan ("penerimaan") kepada khalayak luas secara terbuka, komprehensif, dan mudah dipahami.

Negara pelaksana dan/atau perusahaan diharapkan secara rutin mengungkap informasi yang diperlukan melalui pelaporan pemerintah dan korporasi (misalnya situs web, laporan tahunan), serta mengumpulkan informasi tersebut dan menjawab kekhawatiran terkait celah dan kualitas data dalam Laporan EITI.
- b) Kecuali terdapat hambatan praktis yang signifikan, pemerintah diwajibkan untuk mengungkap jumlah total penerimaan yang diterima dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan, yang diuraikan berdasarkan aliran penerimaan.
- c) Kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk menyepakati pembayaran dan pendapatan mana yang sifatnya material dan oleh karena itu harus diuraikan sesuai dengan Persyaratan 4.7. Kelompok pemangku kepentingan multipihak harus menyepakati definisi dan ambang batas materialitas yang sesuai untuk aliran penerimaan dan entitas pelaporan. Pembayaran dan penerimaan dianggap material jika penghilangan atau penyajian yang salah dapat secara signifikan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan. Semua aliran penerimaan dan pembayaran satu kali oleh perusahaan minyak, gas, dan pertambangan harus dimasukkan dalam pertimbangan materialitas. Kelompok pemangku kepentingan harus mendokumentasikan opsi yang dipertimbangkan dan alasan penetapan definisi dan ambang batas.
- d) Negara-negara yang menerapkan ketentuan ini diwajibkan untuk memastikan bahwa semua entitas pemerintah yang menerima penerimaan material dari perusahaan minyak, gas, dan pertambangan mengungkapkan penerimaan tersebut secara komprehensif sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

Semua perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang melakukan pembayaran material kepada pemerintah diwajibkan untuk mengungkapkan pembayaran material secara komprehensif sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

Sebuah perusahaan atau entitas pemerintah hanya boleh dibebaskan dari pengungkapan pembayaran atau penerimaan material jika kelompok pemangku kepentingan telah menyetujui untuk pengungkapan sepihak oleh pemerintah atau perusahaan sesuai dengan Persyaratan 4.9.

- e) Perusahaan diharapkan untuk mengungkap secara publik laporan keuangan yang diaudit, atau pos-pos utama (neraca, laporan laba/rugi, arus kas, dan tarif pajak

efektif) jika laporan keuangan tidak tersedia di tingkat negara.

Perusahaan didorong untuk mengungkapkan pengurangan pajak dan insentif selama periode yang ditinjau.

4.2 Penjualan bagian produksi atau penerimaan negara lain yang dikumpulkan dalam bentuk natura (*in kind*)

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan transparansi dalam penjualan minyak, gas, dan/atau sumber daya mineral atau penerimaan lain yang dikumpulkan dalam bentuk barang, agar masyarakat dapat menilai apakah nilai penjualan sesuai dengan nilai pasar, serta untuk memastikan jejak dana hasil penjualan komoditas tersebut hingga ke Kas Negara.

- a) Jika penjualan bagian produksi minyak, gas, dan/atau sumber daya mineral milik negara atau penerimaan lain yang diterima dalam bentuk natura bersifat material, pemerintah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), diwajibkan untuk mengungkapkan volume yang diterima dan dijual oleh negara (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara untuk menjual atas nama mereka); penerimaan yang diterima dari penjualan; dan penerimaan yang ditransfer ke negara dari hasil penjualan minyak, gas, dan mineral. Jika berlaku, hal ini harus mencakup pembayaran (tunai maupun natura) yang terkait dengan perjanjian pertukaran dan pinjaman yang dijamin oleh sumber daya (resource-backed loans) (lihat definisi dalam Persyaratan 4.3).

Data yang dipublikasikan harus dirinci berdasarkan masing-masing perusahaan pembeli dan pada tingkat perincian yang sepadan dengan pelaporan pembayaran dan aliran penerimaan lainnya (Persyaratan 4.7). Pemangku kepentingan multi-pihak, melalui konsultasi dengan perusahaan pembeli, diharapkan mempertimbangkan apakah pengungkapan perlu dirinci berdasarkan setiap transaksi penjualan, jenis produk, dan harga.

Pemangku kepentingan multi-pihak dianjurkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan atas produk yang dijual serta sifat kontrak (misalnya kontrak spot atau jangka panjang).

- b) Negara pelaksana, termasuk BUMN, dianjurkan untuk mengungkapkan uraian mengenai proses pemilihan perusahaan pembeli; kriteria teknis dan keuangan yang digunakan dalam pemilihan tersebut; daftar perusahaan pembeli yang terpilih termasuk informasi kepemilikan manfaat (apabila tersedia); identitas perantara atau agen (jika ada); serta setiap penyimpangan material dari kerangka hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur pemilihan perusahaan pembeli dan perjanjian penjualan terkait.
- c) Negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan perjanjian penjualan terkait dengan perusahaan pembeli.
- d) Perusahaan yang membeli minyak, gas, dan/atau sumber daya mineral dari negara, termasuk BUMN (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara untuk menjual atas nama mereka), didorong untuk mengungkap volume yang diterima dari negara atau BUMN dan pembayaran yang dilakukan untuk pembelian minyak, gas, dan/atau sumber daya mineral. Hal ini dapat mencakup pembayaran (dalam bentuk tunai atau barang) yang terkait dengan perjanjian pertukaran dan pinjaman yang dijamin oleh sumber daya.

Perusahaan didorong untuk mempublikasikan data yang disusun berdasarkan penjual individu, kontrak, atau penjualan. Pengungkapan untuk setiap penjualan dapat mencakup informasi tentang jenis kontrak (misalnya spot atau jangka panjang) dan pelabuhan muat.

- e) Jika ada kekhawatiran terkait keandalan data dan jika secara praktis memungkinkan, kelompok multi-pihak harus mempertimbangkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi celah, inkonsistensi, dan ketidakteraturan dalam informasi yang diungkapkan.

4.3 Ketentuan infrastruktur dan pengaturan barter

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan pemahaman publik mengenai ketentuan penyediaan infrastruktur dan pengaturan berbasis barter, termasuk pinjaman yang dijamin dengan sumber daya, yang memberikan porsi signifikan dari manfaat pemerintah dari suatu proyek ekstraktif, yang sepadan dengan pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah berbasis tunai dari sektor minyak, gas, dan pertambangan, sebagai dasar perbandingan dengan perjanjian konvensional.

- a) Kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk mempertimbangkan apakah terdapat perjanjian atau kumpulan perjanjian yang melibatkan penyediaan barang dan jasa (termasuk pinjaman, hibah, dan pekerjaan infrastruktur), baik secara penuh maupun sebagian, sebagai imbalan atas konsesi eksplorasi atau produksi minyak, gas, atau pertambangan, atau pengiriman fisik dari komoditas-komoditas tersebut. Hal ini mencakup penyediaan barang dan jasa yang dijamin oleh aliran pendapatan masa depan dari kekayaan sumber daya alam, yang memenuhi definisi utang negara yang dijamin oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Untuk dapat melakukannya, kelompok pemangku kepentingan perlu memahami sepenuhnya syarat-syarat perjanjian dan kontrak yang relevan; pihak-pihak yang terlibat; sumber daya yang telah dijamin oleh negara; nilai aliran manfaat penyeimbang (misalnya proyek infrastruktur); dan materialitas perjanjian-perjanjian ini dibandingkan dengan kontrak pada umumnya.
- b) Jika kelompok multi-pihak menyimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian ini bersifat material, kelompok multi-pihak diwajibkan untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian ini dijelaskan secara komprehensif kepada publik dan bahwa pengungkapan tersebut menyediakan tingkat detail dan pemisahan yang sepadan dengan aliran pembayaran dan penerimaan lainnya.

Negara pelaksana dianjurkan untuk mempublikasikan perjanjian barter atau infrastruktur yang mendasari, termasuk perjanjian pinjaman yang didukung oleh sumber daya.

- c) Kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk menyepakati prosedur untuk menangani kualitas data dan jaminan informasi yang tercantum di atas, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

4.4 Penerimaan dari transportasi

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan transparansi dalam penerimaan negara dan badan usaha milik negara (BUMN) dari pengangkutan minyak, gas, dan mineral sebagai dasar untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengaturan pengangkutan komoditas ekstraktif yang melibatkan negara atau BUMN.

- a) Jika penerimaan dari pengangkutan minyak, gas, dan mineral bersifat material, pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) wajib mengungkapkan penerimaan yang diterima. Data yang dipublikasikan harus menyediakan tingkat rincian dan pengelompokan yang sepadan dengan aliran pembayaran dan penerimaan lainnya (Persyaratan 4.7).
- b) Negara-negara yang menerapkan kebijakan ini didorong untuk mengungkapkan:
 - i. Deskripsi tentang pengaturan pengangkutan, termasuk produk; rute pengangkutan; dan perusahaan serta entitas pemerintah yang terlibat dalam pengangkutan, termasuk BUMN.
 - ii. Definisi pajak, tarif, atau pembayaran lain yang relevan terkait transportasi, serta metodologi yang digunakan untuk menghitungnya.
 - iii. Pengungkapan tarif dan volume komoditas yang diangkut.

- iv. Pengungkapan penerimaan oleh entitas pemerintah dan BUMN, terkait dengan pengangkutan minyak, gas, dan mineral.

4.5 Transaksi terkait badan usaha milik negara (BUMN)

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan jejak pembayaran dan transfer yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), serta memperkuat pemahaman publik mengenai apakah penerimaan yang seharusnya diterima negara telah ditransfer secara efektif ke negara dan tingkat dukungan keuangan negara bagi BUMN.

- a) Kelompok multi-pihak diwajibkan untuk memastikan bahwa proses pelaporan secara komprehensif mencakup peran badan usaha milik negara (BUMN), termasuk pengungkapan yang komprehensif dan dapat diandalkan mengenai pembayaran material perusahaan kepada BUMN, transfer BUMN kepada lembaga pemerintah, dan transfer pemerintah kepada BUMN.

4.6 Pembayaran ke daerah

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memungkinkan pemangku kepentingan memahami manfaat yang diperoleh pemerintah daerah melalui transparansi dalam pembayaran langsung perusahaan kepada entitas daerah, serta memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan pendapatan ekstraktif yang dihasilkan secara internal oleh pemerintah daerah.

- a) Kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk menentukan apakah pembayaran langsung (dalam lingkup aliran manfaat yang disepakati, dari perusahaan kepada entitas pemerintah daerah) bersifat material. Jika bersifat material, kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk memastikan bahwa pembayaran perusahaan kepada entitas pemerintah daerah dan penerimaan pembayaran tersebut diungkapkan. Kelompok pemangku kepentingan diwajibkan untuk menyepakati prosedur untuk mengatur kualitas data dan jaminan informasi mengenai pembayaran daerah, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

4.7 Tingkat disagregasi

Tujuan persyaratan ini adalah memastikan pemisahan data dalam pengungkapan publik mengenai pembayaran perusahaan dan penerimaan pemerintah dari sektor minyak, gas, dan pertambangan, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah dapat memantau bukti penerimaannya sesuai dengan kerangka hukum dan fiskal yang berlaku, serta memastikan bahwa pemerintah menerima apa yang seharusnya diterima dari setiap proyek ekstraktif individu.

- a) Negara-negara yang menerapkan EITI diwajibkan untuk mengungkap data EITI yang disusun secara terperinci berdasarkan setiap proyek individu, perusahaan, entitas pemerintah, dan aliran penerimaan.

TERMINOLOGI

Sebuah "proyek" didefinisikan sebagai kegiatan operasional yang diatur berdasarkan sebuah kontrak, izin, sewa, konsesi, atau perjanjian hukum serupa, dan menjadi dasar untuk kewajiban pembayaran kepada pemerintah. Namun, jika ada beberapa perjanjian yang saling terhubung secara substansial, kelompok pemangku kepentingan harus secara jelas mengidentifikasi dan mendokumentasikan mana yang dianggap sebagai satu proyek.

"Perjanjian yang secara substansial saling terhubung" adalah kumpulan kontrak, izin, sewa, konsesi, atau perjanjian terkait lainnya yang secara operasional dan letak geografis terintegrasi, dengan syarat-syarat yang secara substansial serupa, yang ditandatangani dengan pemerintah, dan menghasilkan serangkaian kewajiban pembayaran. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat diatur oleh sebuah

kontrak, usaha patungan, perjanjian berbagi produksi, atau perjanjian hukum lain yang bersifat menyeluruh.

Jika pembayaran yang termasuk dalam lingkup pengungkapan EITI dikenakan pada tingkat entitas alih-alih tingkat proyek, perusahaan didorong untuk mengungkapkan pembayaran tersebut pada tingkat entitas.

4.8 Ketepatan waktu data

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa pengungkapan publik mengenai pembayaran perusahaan dan penerimaan negara dari minyak, gas, dan pertambangan disampaikan tepat waktu sehingga memungkinkan dilakukannya debat publik dan perumusan kebijakan.

- a) Negara pelaksana diharapkan menerbitkan informasi secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan Standar EITI dan rencana kerja yang disepakati (Persyaratan 1.5 dan sesuai dengan Persyaratan 7.2(a)(ii-iii)) secara tahunan. Kelompok pemangku kepentingan multipihak harus menyepakati periode akuntansi yang dicakup oleh pengungkapan EITI.
- b) Data harus tidak lebih tua dari periode akuntansi terakhir yang lengkap (misalnya, informasi terkait tahun fiskal 2023 harus dipublikasikan paling lambat pada 31 Desember 2025).

4.9 Kualitas data dan penjaminan

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai telah diambil guna menjamin keandalan pengungkapan pembayaran perusahaan dan/atau penerimaan pemerintah dari sektor minyak, gas, dan pertambangan. Tujuannya adalah agar EITI berkontribusi pada penguatan sistem dan praktik audit serta penjaminan rutin pemerintah dan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan memiliki keyakinan terhadap keandalan data keuangan mengenai pembayaran dan penerimaan, serta data industri ekstraktif lainnya.

- a) Kelompok Pemangku kepentingan multi-pihak wajib memberikan penilaian mengenai apakah penerimaan negara telah diaudit oleh auditor yang kredibel dan independen dengan menerapkan standar audit internasional.
- b) Pengungkapan pemerintah dan perusahaan yang diatur oleh Persyaratan 4 diharapkan tunduk pada audit yang kredibel dan independen, yang menerapkan standar audit internasional. Kelompok pemangku kepentingan multipihak diharapkan memberikan penjelasan mengenai prosedur audit dan jaminan yang mendasari data tersebut, serta memberikan akses publik terhadap dokumen pendukung.
- c) Kelompok pemangku kepentingan diharapkan menyepakati prosedur yang mengatur kualitas dan jaminan data sesuai dengan salah satu prosedur standar yang disetujui oleh Dewan EITI. Kelompok pemangku kepentingan diharapkan mendokumentasikan alasan pemilihan prosedur standar tertentu dan menerapkan prosedur standar tersebut tanpa penyimpangan material.

Kelompok pemangku kepentingan didorong untuk menyepakati pendekatan terhadap keandalan data untuk pengungkapan informasi non-penerimaan sesuai dengan Persyaratan EITI 2, 3, 5, dan 6.

Jika kelompok pemangku kepentingan ingin menyimpang dari prosedur standar, persetujuan dari Dewan EITI harus diminta terlebih dahulu. Permohonan dari kelompok pemangku kepentingan harus mencakup alasan untuk menyimpang dari prosedur standar; apakah ada pengungkapan data rutin yang diwajibkan oleh

Standar EITI dengan detail yang diperlukan; apakah data keuangan tunduk pada audit yang kredibel dan independen sesuai dengan standar internasional; dan apakah ada penyimpanan data historis yang memadai.

4.10 Biaya proyek

Tujuan persyaratan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman publik tentang biaya eksplorasi dan produksi di sektor ekstraktif negara serta kebijakan dan praktik pemerintah dalam memantau biaya perusahaan.

- a) Negara pelaksana standar ini diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan dan praktik pemerintah dalam memantau biaya proyek minyak, gas, dan pertambangan serta mengelola risiko kerugian pendapatan. Hal ini harus mencakup pengungkapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan, serta tindakan yang diambil untuk memantau biaya.
- b) Negara pelaksana diharuskan untuk mengungkapkan laporan audit biaya dan pajak akhir, atau ringkasan dari laporan tersebut, termasuk biaya yang dianggap tidak dapat dikembalikan dan biaya yang dianggap tidak dapat dikurangkan, serta pendapatan tambahan yang akan dikumpulkan sebagai akibatnya.
- c) Perusahaan dan negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan biaya yang dilaporkan secara terperinci berdasarkan proyek, serta biaya yang terkait dengan pengeluaran operasional dan modal. Pengeluaran operasional yang dilaporkan pada tahun pelaporan dapat mencakup amortisasi atau depresiasi biaya yang dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan dan negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan biaya yang dikeluarkan sejak dimulainya proyek.

PERSYARATAN 5

Pengelolaan dan distribusi penerimaan

EITI mengharuskan pengungkapan informasi terkait alokasi penerimaan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana penerimaan dicatat dalam APBN dan, jika berlaku, juga APBD, serta melacak belanja sosial oleh perusahaan.

5.1 Distribusi penerimaan

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan jejak penerimaan negara dari sektor ekstraktif hingga ke APBN dan memastikan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang sama untuk pendapatan dari sektor ekstraktif yang tidak tercatat dalam APBN.

- a) Negara pelaksana persyaratan ini diwajibkan untuk mengungkapkan deskripsi distribusi penerimaan dari industri ekstraktif.
- b) Negara pelaksana wajib menyebutkan pendapatan dari industri ekstraktif, baik berupa uang tunai maupun natura, yang tercatat dalam APBN. Jika penerimaan tidak tercatat dalam APBN, alokasi dan nilai setiap aliran penerimaan harus dijelaskan, dengan menyertakan tautan ke laporan keuangan yang relevan sesuai dengan ketentuan (misalnya dana kekayaan negara dan dana pembangunan, pemerintah daerah, BUMN, dan entitas di luar anggaran lainnya).
- c) Kelompok multi-pihak didorong untuk merujuk pada sistem klasifikasi penerimaan negara dan standar internasional seperti *IMF Government Finance Statistics (GFS) Manual*.

5.2 Transfer ke daerah

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memungkinkan pemangku kepentingan di tingkat daerah menilai apakah transfer dan pengelolaan transfer penerimaan ekstraktif antarpemerintah daerah sesuai dengan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a) Jika transfer antara entitas pemerintah pusat dan daerah terkait penerimaan yang dihasilkan oleh industri ekstraktif dan diwajibkan oleh UU nasional, undang-undang, atau aturan terkait pembagian penerimaan lainnya, kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk memastikan bahwa transfer yang signifikan diungkapkan. Negara pelaksana kebijakan ini wajib mengungkap rumusan pembagian penerimaan, jika ada, serta perbedaan antara transfer yang diharapkan (dihitung sesuai dengan formula pembagian pendapatan yang relevan) dan jumlah sebenarnya yang ditransfer antara pemerintah pusat dan setiap entitas daerah yang terkait.

Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan atas ketidaksesuaian tersebut. Kelompok pemangku kepentingan didorong untuk menyepakati prosedur untuk mengatur kualitas data dan jaminan informasi mengenai transfer ke daerah, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

- b) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak didorong untuk memastikan bahwa setiap transfer diskresioner atau *ad-hoc* yang signifikan diungkapkan, serta menyepakati prosedur untuk mengatur kualitas data dan jaminan informasi terkait transfer tersebut, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

- c) Kelompok pemangku kepentingan multi-pihak didorong untuk melaporkan tentang penyaluran dana sebenarnya dan bagaimana penerimaan dari sektor ekstraktif yang dialokasikan untuk program atau investasi tertentu di tingkat daerah dikelola, serta bagaimana program-program tersebut menjawab kepentingan perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

5.3 Informasi tambahan tentang pengelolaan penerimaan dan belanja

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan penerimaan ekstraktif; penggunaan penerimaan ekstraktif untuk membiayai belanja negara tertentu; dan asumsi yang mendasari proses anggaran, termasuk pertimbangan terkait keberlanjutan penerimaan.

- a) Negara pelaksana dianjurkan untuk mengungkapkan informasi tambahan tentang pengelolaan penerimaan dan belanja, termasuk:
 - i. Deskripsi tentang penerimaan ekstraktif yang dialokasikan untuk program-program tertentu, termasuk yang berkaitan dengan gender, atau untuk wilayah geografis tertentu. Hal ini harus mencakup deskripsi tentang metode untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaannya.
 - ii. Deskripsi proses anggaran dan audit negara serta tautan ke informasi publik yang tersedia tentang anggaran, pengeluaran, dan laporan audit.
 - iii. Informasi yang disajikan tepat waktu yang akan memperkuat pemahaman dan debat publik seputar isu-isu keberlanjutan penerimaan dan ketergantungan sumber daya. Hal ini dapat mencakup asumsi yang mendasari tahun-tahun mendatang dalam siklus anggaran dan proporsi pendapatan fiskal masa depan yang diharapkan berasal dari sektor ekstraktif.
- b) Negara pelaksana kebijakan ini diharapkan untuk mengungkap perkiraan terkait penerimaan masa depan dari sektor ekstraktif, termasuk asumsi yang mendasari tingkat produksi yang diproyeksikan, biaya proyek yang diproyeksikan, dan harga komoditas yang diproyeksikan, jika ada. Pemerintah didorong untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan transisi energi dan risiko iklim telah dipertimbangkan dalam perkiraan pendapatan.
- c) Ketika diminta oleh kelompok pemangku kepentingan, perusahaan minyak, gas, dan pertambangan didorong untuk mengungkapkan tingkat produksi proyek yang diproyeksikan, serta garis waktu perkiraan terkait pemulihan biaya.

PERSYARATAN 6

Belanja sosial dan ekonomi

EITI mendorong pengungkapan informasi terkait pengelolaan penerimaan dan belanja, membantu pemangku kepentingan dalam menilai apakah sektor ekstraktif menghasilkan dampak dan hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diharapkan.

6.1 Belanja sosial dan pembayaran lingkungan

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memfasilitasi pemahaman publik terhadap kontribusi sosial dan lingkungan perusahaan ekstraktif, serta untuk memberikan dasar dalam menilai kepatuhan perusahaan ekstraktif terhadap kewajiban hukum dan kontrak mereka dalam melaksanakan belanja sosial dan lingkungan.

- a) Jika belanja sosial yang signifikan oleh perusahaan diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak dengan pemerintah yang mengatur investasi ekstraktif, negara pelaksana diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi tersebut. Jika manfaat tersebut diberikan dalam bentuk natura, negara pelaksana harus mengungkapkan sifat dan nilai yang dianggap dari transaksi tersebut. Jika penerima manfaat dari pengeluaran sosial yang diwajibkan adalah pihak ketiga (bukan lembaga pemerintah), maka nama dan fungsi pemilik manfaat harus diungkapkan. Negara pelaksana diwajibkan untuk mengungkapkan data yang disusun berdasarkan jenis kelamin mengenai pemilik manfaat, jika tersedia. Jika rekonsiliasi tidak memungkinkan, negara harus menyediakan pengungkapan sepihak oleh perusahaan dan/atau pemerintah mengenai transaksi tersebut.

Negara pelaksana diharapkan untuk mengungkapkan kontrak, dan dokumen lain yang diwajibkan oleh hukum, yang menggambarkan tingkat dan alokasi belanja sosial wajib yang material.

- b) Jika pembayaran material oleh perusahaan kepada pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan diatur oleh undang-undang, peraturan, atau kontrak yang mengatur investasi ekstraktif, negara pelaksana diwajibkan untuk mengungkapkan pembayaran tersebut.

Jika pembayaran lingkungan diatur oleh kontrak, negara pelaksana diharapkan untuk mengungkapkan kontrak-kontrak tersebut.

- c) Kelompok pemangku kepentingan multipihak diwajibkan untuk menyepakati prosedur untuk mengatur kualitas data dan jaminan informasi mengenai belanja sosial dan lingkungan, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

Kelompok pemangku kepentingan didorong untuk memasukkan dalam prosedur ini evaluasi apakah kewajiban hukum atau kontrak terkait belanja atau pembayaran sosial dan lingkungan telah diikuti dengan praktik di lapangan.

- d) Jika kelompok pemangku kepentingan sepakat bahwa belanja sosial diskresioner, belanja lingkungan, dan/atau pembayaran lingkungan diskresioner bersifat material, kelompok pemangku kepentingan didorong untuk mengembangkan proses pelaporan dengan tujuan mencapai transparansi yang setara dengan pengungkapan pembayaran dan pendapatan lainnya, serta menyediakan data yang disusun berdasarkan gender tentang penerima manfaat dari pengeluaran dan transfer tersebut, jika tersedia. Kelompok pemangku kepentingan didorong untuk menyepakati prosedur untuk mengatur kualitas data dan jaminan informasi yang tercantum di atas, sesuai dengan Persyaratan 4.9.

6.2 Belanja quasi-fiskal

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa ketika BUMN melakukan belanja yang didanai dari sektor ekstraktif atas nama pemerintah yang tidak tercantum dalam APBN, belanja tersebut harus diungkapkan untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

- a) Apabila partisipasi negara dalam industri ekstraktif menghasilkan pembayaran belanja material, negara pelaksana diwajibkan untuk memasukkan pengungkapan dari BUMN tentang belanja quasi-fiskalnya. Kelompok multi-pihak harus mengembangkan proses pelaporan dengan tujuan mencapai tingkat transparansi yang setara dengan belanja dan aliran penerimaan lainnya, dan harus meliputi anak perusahaan BUMN dan usaha patungan.

TERMINOLOGI

“Belanja quasi-fiskal” mencakup pengaturan di mana BUMN melakukan belanja sosial publik (seperti pembayaran untuk layanan sosial, infrastruktur umum, subsidi bahan bakar, dan pelunasan utang negara, dll.) di luar proses APBN.

Negara pelaksana dan kelompok pemangku kepentingan didorong untuk mempertimbangkan definisi IMF mengenai belanja quasi-fiskal saat menentukan apakah pembelanjaan tersebut dikategorikan sebagai belanja quasi-fiskal.

6.3 Kontribusi sektor ekstraktif terhadap ekonomi

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan pemahaman publik tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian nasional dan tingkat ketergantungan pada sumber daya alam dalam perekonomian.

- a) Negara pelaksana diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian untuk tahun fiskal selama masa implementasi EITI. Sejauh tersedia, informasi ini harus meliputi:
 - i. Ukuran industri ekstraktif dalam nilai mutlak dan sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB), serta perkiraan aktivitas sektor informal, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertambangan rakyat dan skala kecil.
 - ii. Penerimaan negara total yang dihasilkan oleh industri ekstraktif (termasuk pajak, royalti, bonus, biaya, dan pembayaran lain) dalam nilai mutlak dan sebagai persentase dari total penerimaan negara.
 - iii. Ekspor dari industri ekstraktif dalam nilai mutlak dan sebagai persentase dari total ekspor.
 - iv. Angka tenaga kerja di sektor publik dan swasta industri ekstraktif dalam angka mutlak dan sebagai persentase dari total tenaga kerja. Informasi tersebut harus diuraikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, jika tersedia, serta diuraikan lebih lanjut berdasarkan perusahaan dan proyek, serta antara warga negara lokal dan asing.

Perusahaan didorong untuk mengungkapkan kesenjangan upah berdasarkan jenis kelamin.

- v. Wilayah/daerah utama di mana produksi terkonsentrasi.

6.4 Dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ekstraktif

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memberikan dasar bagi pemangku kepentingan untuk menilai kecukupan kerangka regulasi dan upaya pemantauan dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial industri ekstraktif, serta menilai kepatuhan perusahaan ekstraktif terhadap kewajiban lingkungan dan sosial.

- a) Negara pelaksana persyaratan ini diwajibkan untuk mengungkapkan gambaran umum tentang ketentuan hukum dan aturan administratif yang mengatur pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial di sektor ekstraktif. Hal ini harus mencakup informasi tentang aturan terkait izin dan lisensi lingkungan, termasuk penilaian dampak lingkungan, aspek sosial dan gender, serta program rehabilitasi, penghentian operasi, dan penutupan tambang (dekomisioning). Dokumen juga harus mencakup informasi mengenai peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah terkait dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kelompok multi-pihak didorong untuk juga menyertakan informasi mengenai reformasi yang direncanakan atau sedang berlangsung.

- b) Negara pelaksana dan perusahaan pelapor diwajibkan untuk memastikan bahwa penilaian dampak lingkungan, sosial, dan gender yang bersifat publik, laporan pemantauan, izin, dan lisensi yang diwajibkan oleh undang-undang atau kontrak, pada praktiknya dapat diakses secara publik.
- c) Perusahaan didorong untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut tentang pengelolaan dan dampak sosial, gender, dan lingkungan mereka.
- d) Negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan informasi mengenai praktik pemantauan dan penegakan hukum terkait dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan ekstraktif. Hal ini dapat mencakup informasi mengenai kegiatan pemantauan lingkungan dan sosial yang telah dilakukan terkait air, tanah, emisi, dan hak asasi manusia, serta hasil dari kegiatan tersebut.
- e) Negara pelaksana didorong untuk mengungkapkan informasi tentang proses sanksi lingkungan, termasuk sanksi yang diterapkan.

PERSYARATAN 7

Hasil dan dampak

Pengungkapan rutin data industri ekstraktif tidak memiliki manfaat praktis tanpa adanya kesadaran publik, pemahaman tentang arti angka yang disajikan, dan debat publik tentang tata kelola sektor ekstraktif. Persyaratan EITI terkait hasil dan dampak bertujuan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan terlibat dalam dialog tentang pengelolaan penerimaan sumber daya alam.

Pengungkapan EITI mengarah pada pemenuhan Prinsip-prinsip EITI dengan berkontribusi pada debat publik yang lebih luas. Sangat penting pula agar pelajaran yang dipetik selama implementasi ditindaklanjuti; rekomendasi dari implementasi EITI dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan; serta implementasi EITI berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

7.1 Debat publik

Tujuan persyaratan ini adalah memfasilitasi debat publik berbasis bukti tentang tata kelola industri ekstraktif – termasuk risiko korupsi, transisi energi, gender, dan pengumpulan penerimaan – melalui sosialisasi secara aktif data-data terkait kepada pemangku kepentingan utama dengan cara yang mudah diakses dan mencerminkan kebutuhan pemangku kepentingan.

- a) Kelompok multi-pihak diharuskan memastikan bahwa pengungkapan informasi oleh pemerintah dan perusahaan mudah dipahami, disosialisasikan secara aktif, dapat diakses publik, dan berkontribusi pada diskusi publik. Pihak-pihak utama yang harus dilibatkan meliputi pemerintah, anggota parlemen, masyarakat sipil, perusahaan, dan media.
- b) Kelompok multi-pihak diharuskan untuk:
 - i. Memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan didistribusikan secara luas.
 - ii. Memastikan bahwa informasi tersebut mudah dipahami, termasuk dengan memastikan bahwa informasi ditulis dalam gaya bahasa yang jelas dan mudah diakses, serta mempertimbangkan tantangan akses dan kebutuhan informasi dari berbagai gender dan kelompok masyarakat.
 - iii. Memastikan bahwa keterlibatan dengan pemangku kepentingan dan acara penjangkauan (baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat sipil, atau perusahaan) dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi dialog tentang tata kelola sumber daya ekstraktif, dengan memanfaatkan pengungkapan EITI di seluruh pelosok negeri secara inklusif bagi semua kalangan.
- c) Kelompok pemangku kepentingan multipihak didorong untuk:
 - i. Menyusun laporan ringkasan singkat dengan analisis yang jelas dan seimbang terhadap informasi, memastikan bahwa sumber data dan penulisan laporan dinyatakan dengan jelas.
 - ii. Menyusun laporan tematik tentang bidang-bidang spesifik dalam pengelolaan sektor ekstraktif, dan membuatnya tersedia secara daring.
 - iii. Menggunakan implementasi EITI untuk mengungkap data di luar Persyaratan EITI yang dapat memperkaya debat publik tentang tata kelola sektor ekstraktif, termasuk risiko korupsi, kesetaraan gender, pengumpulan

penerimaan, dampak transisi energi, dan pertambangan rakyat dan skala kecil, sebagaimana ditentukan oleh kelompok multipihak.

- iv. Buat ringkasan dan bandingkan porsi masing-masing sumber penerimaan negara terhadap total penerimaan yang diterima oleh masing-masing tingkat pemerintahan.
- v. Lakukan upaya peningkatan kapasitas, terutama dengan masyarakat sipil dan melalui organisasi masyarakat sipil, untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi dan data dari laporan dan pengungkapan daring, serta mendorong penggunaan informasi tersebut oleh warga, media, dan pihak lain.

7.2 Aksesibilitas data dan data terbuka

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memfasilitasi penggunaan dan analisis yang lebih luas terhadap informasi tentang industri ekstraktif, melalui publikasi informasi dalam format data terbuka dan dapat dibuka di berbagai sistem dan aplikasi.

- a) Negara pelaksana diwajibkan untuk memastikan bahwa pengungkapan EITI dapat diakses secara publik. Kelompok multi-pihak harus:
 - i. Menyepakati kebijakan data terbuka yang jelas tentang akses, publikasi, dan pemanfaatan ulang data EITI. Lembaga pemerintah dan perusahaan diharapkan mempublikasikan data EITI dengan lisensi terbuka, serta memberitahukan kepada pengguna bahwa informasi dapat digunakan kembali tanpa persetujuan sebelumnya.
 - ii. Menyediakan data dalam format data terbuka secara daring dan mengumumkan ketersediaannya kepada publik. Format data terbuka berarti data tersedia dalam format CSV atau Excel dan meliputi semua data tabel, grafik, dan gambar dari Laporan EITI.
 - iii. Menyelesaikan berkas data ringkasan untuk setiap tahun fiskal yang dicakup oleh EITI sesuai dengan templat yang disetujui oleh Dewan EITI.⁴
- b) Negara pelaksana didorong untuk membuat data yang diungkapkan secara sistematis dapat dibaca oleh mesin dan berbagai sistem, serta menyusun pengungkapan EITI dan berkas data lainnya sehingga informasi dapat dibandingkan dengan data publik lainnya.

7.3 Rekomendasi dari implementasi EITI

Tujuan persyaratan ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi EITI merupakan proses pembelajaran berkelanjutan yang berkontribusi pada perumusan kebijakan, dengan memastikan bahwa kelompok pemangku kepentingan multipihak secara teratur mempertimbangkan temuan dan rekomendasi dari proses EITI dan mengambil tindakan terhadap rekomendasi yang dianggap prioritas (lihat Persyaratan 1.5).

- a) Dengan tujuan memperkuat dampak implementasi EITI terhadap tata kelola sumber daya alam, kelompok pemangku kepentingan diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti pelajaran yang dipetik; mengidentifikasi, mempelajari, dan menjawab penyebab adanya celah informasi dan ketidaksesuaian; serta mempertimbangkan rekomendasi yang dihasilkan dari implementasi EITI. Kelompok pemangku kepentingan harus mempertimbangkan untuk menyetujui rekomendasi untuk memperkuat sistem pemerintah dan mengikuti perkembangan rekomendasi tersebut.

BAGIAN 4

Harapan bagi perusahaan yang mendukung EITI

Bagian ini menetapkan harapan yang harus dipatuhi oleh perusahaan saat mereka mendukung EITI.

Perusahaan pendukung EITI harus menyadari bahwa peningkatan transparansi dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya alam; memperkuat tata kelola publik dan korporasi; menekan korupsi; serta menyediakan data untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Perusahaan pendukung, melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan komunitas.

Perusahaan pendukung mematuhi Standar EITI melalui pelaporan di negara pelaksana EITI tempatnya beroperasi. Perusahaan pendukung juga didorong untuk berpartisipasi dalam kelompok multi-pihak dan secara aktif terlibat dalam proses EITI di negara-negara yang menerapkan EITI.

Perusahaan pendukung EITI lebih lanjut perlu mendukung pula implementasi EITI melalui keanggotaan mereka dalam Asosiasi EITI, dengan memenuhi seperangkat Ekspektasi ini dan kontribusi keuangan tahunan untuk pengelolaan internasional EITI.

Seluruh perusahaan pendukung EITI diharapkan untuk:

Ekspektasi 1

Menyatakan dan mempublikasikan dukungan secara terbuka terhadap EITI dan tujuan Asosiasi EITI untuk menjadikan Prinsip-prinsip EITI dan Standar EITI sebagai standar transparansi yang diakui secara internasional di sektor minyak, gas, dan pertambangan.

Ekspektasi 2

Melakukan pengungkapan komprehensif sesuai dengan Standar EITI di semua negara yang menerapkan EITI di mana perusahaan atau anak perusahaan yang dikendalikan beroperasi. Jika tidak diungkapkan dalam laporan perusahaan lainnya, perusahaan diharapkan secara terbuka mengumumkan daftar anak perusahaan yang dikendalikan yang beroperasi di sektor minyak, gas, atau pertambangan di negara-negara yang menerapkan EITI.

Ekspektasi 3

Mengungkapkan secara publik pajak dan pembayaran kepada pemerintah pada tingkat proyek sesuai dengan Standar EITI di semua negara non-pelaksana EITI di mana perusahaan beroperasi, kecuali jika pengungkapan tidak memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hambatan hukum atau praktis yang spesifik di tiap negara untuk

pengungkapan harus dijelaskan kepada publik.

Ekspektasi 4

Bagi perusahaan yang membeli sumber daya minyak, gas, dan/atau mineral dari pemerintah di negara-negara yang menerapkan EITI, perusahaan diharapkan mengungkapkan volume yang diterima dan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Standar EITI dan pedoman pelaporan EITI untuk perusahaan yang membeli minyak, gas, dan mineral dari pemerintah, kecuali jika pengungkapan tidak memungkinkan.

Ekspektasi 5

Sesuai dengan Standar EITI, perusahaan mengumumkan secara terbuka laporan keuangan yang telah diaudit, atau pos-pos utama (neraca, laporan laba/rugi, arus kas) jika laporan keuangan tidak tersedia.

Ekspektasi 6

Mengumumkan dan mempublikasikan dukungan terhadap transparansi kepemilikan manfaat, serta mengumumkan pemilik manfaat sesuai dengan Standar EITI, dengan memperhatikan bahwa perusahaan terdaftar akan mengumumkan nama bursa efek tempat mereka terdaftar, menyertakan tautan ke pengajuan bursa efek, dan melakukan apa yang diwajibkan oleh peraturan dan persyaratan pencatatan yang berlaku.

Ekspektasi 7

Melakukan proses uji tuntas yang ketat dan memberlakukan kebijakan anti-korupsi yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola risiko korupsi, termasuk bagaimana perusahaan mengumpulkan dan mengambil langkah-langkah berbasis risiko untuk menggunakan data pemilik manfaat terkait mitra usaha patungan, kontraktor, dan pemasok dalam prosesnya.

Ekspektasi 8

Menyatakan dan mengumumkan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk mempublikasikan kontrak dan lisensi yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan mineral sesuai dengan Standar EITI, serta berkontribusi pada pengungkapan publik kontrak dan izin di negara-negara yang menerapkan EITI sesuai dengan prosedur pemerintah.

Ekspektasi 9

Menerbitkan komitmen dan/atau kebijakan mengenai keragaman gender di sektor minyak, gas, atau pertambangan, serta mendukung pelaporan oleh negara-negara yang menerapkan EITI sesuai dengan Standar EITI dengan mengungkapkan data tenaga kerja di sektor-sektor tersebut yang dipisahkan berdasarkan gender.

Penilaian terhadap Ekspektasi bagi Perusahaan Pendukung EITI

Sekretariat Internasional EITI menilai apakah perusahaan pendukung memenuhi Ekspektasi sebelum Rapat Anggota Asosiasi EITI, yang biasanya diadakan setiap tiga tahun sekali bersamaan dengan Konferensi Global EITI dan memiliki mandat untuk memilih Dewan EITI. Hasil penilaian dipublikasikan setelah tinjauan terhadap perusahaan pendukung.

Semua perusahaan pendukung EITI diharapkan untuk memenuhi Ekspektasi. Perusahaan yang dinilai tidak sepenuhnya memenuhi Ekspektasi didorong untuk memenuhi kekurangan yang masih ada dalam hal kepatuhan dan akan dinilai sepenuhnya memenuhi Ekspektasi ketika kekurangan telah terpenuhi, setelah pemberitahuan kepada dan penilaian ulang oleh Sekretariat Internasional EITI.

Sesuai dengan Pasal 5 dan 8 Anggaran Dasar EITI, setiap Kelompok Kepentingan Asosiasi EITI memutuskan aturan yang mengatur penunjukan Anggota Asosiasi EITI dan pencalonan Anggota dan Pengganti ke Dewan EITI. Aturan ini tercantum dalam Pedoman Kelompok Kepentingan untuk Perusahaan.

Sejalan dengan Pedoman Kelompok Kepentingan untuk Perusahaan, Kelompok Kepentingan Perusahaan berkomitmen untuk mempertimbangkan apakah perusahaan pendukung memenuhi Ekspektasi, sebagaimana dinilai oleh Sekretariat Internasional EITI, sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon untuk Dewan EITI. Kelompok Kepentingan Perusahaan, melalui sub-kelompok kepentingannya, terlebih dahulu mempertimbangkan calon untuk dinominasikan ke Dewan EITI dari perusahaan pendukung yang sepenuhnya memenuhi Ekspektasi. Calon dari perusahaan pendukung baru yang dievaluasi untuk pertama kalinya dan belum sepenuhnya memenuhi Ekspektasi juga dapat dipertimbangkan jika perusahaan tersebut menunjukkan rencana untuk memenuhi kekurangan dalam hal kepatuhan.

Perwakilan perusahaan yang mendukung EITI yang ditunjuk sebagai Anggota Asosiasi EITI tunduk pada Anggaran Dasar EITI dan Kode Etik, sama seperti semua Anggota lain dari Konstituensi Negara, Konstituensi Perusahaan, dan Konstituensi Organisasi Masyarakat Sipil.

BAGIAN 5

Protokol: Partisipasi masyarakat sipil

Bagian ini menetapkan protokol untuk memastikan partisipasi penuh, aktif, dan efektif masyarakat sipil dalam proses EITI.

1. Pengantar

Partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan EITI, termasuk Prinsip EITI 4 yang menyatakan bahwa “pemahaman publik terhadap penerimaan dan belanja negara dari waktu ke waktu dapat membantu debat publik dan memberikan informasi untuk memilih opsi yang tepat dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan”. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses EITI merupakan kunci untuk memastikan bahwa transparansi yang diberikan oleh EITI mengarah pada akuntabilitas yang lebih baik. Motivasi utama dalam penerapan Standar EITI adalah keinginan untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan, lebih dapat diandalkan, dan lebih mudah digunakan, serta menghubungkan informasi ini dengan reformasi yang lebih luas dalam tata kelola sektor ekstraktif atau pengelolaan akuntansi publik dan manajemen penerimaan. Kemampuan masyarakat untuk secara aktif memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh EITI merupakan komponen penting dari implementasi EITI dan partisipasi masyarakat sipil dalam EITI.

Partisipasi masyarakat sipil dalam proses EITI secara formal dievaluasi pada dua tahap implementasi EITI – selama penilaian untuk bergabung dengan EITI dan selama proses Validasi. Penilaian partisipasi masyarakat sipil juga dapat dilakukan secara *situasional* sebagai respons terhadap kekhawatiran yang spesifik disampaikan kepada Dewan EITI terkait situasi di negara-negara pelaksana tertentu. Protokol ini menetapkan pertanyaan yang harus dipertimbangkan oleh Dewan EITI (termasuk Komite Dewan EITI) dan Validator dalam menilai apakah ketentuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat sipil (Persyaratan 1.3) telah dipenuhi, serta jenis bukti yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Meskipun ketentuan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat sipil dalam proses EITI tetap konsisten pada setiap tahap implementasi EITI, bukti yang digunakan oleh Dewan EITI untuk mengevaluasi ketentuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada kondisi negara, tahap implementasi, dan ketersediaan informasi. Perlu dicatat bahwa pertanyaan yang diajukan dan jenis bukti yang disarankan yang tercantum dalam 2.1–2.5 di bawah ini bukanlah merupakan ketentuan, dan daftar yang tersaji bukanlah daftar secara keseluruhan. Namun, protokol ini menyediakan kerangka kerja penilaian untuk ketentuan yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sipil.

2. Penafsiran EITI terhadap ketentuan tentang masyarakat sipil

Untuk tujuan protokol ini, rujukan terhadap “perwakilan masyarakat sipil” mencakup perwakilan masyarakat sipil yang sangat terlibat dalam proses EITI, termasuk tetapi tidak terbatas pada anggota kelompok pemangku kepentingan multipihak.

Rujukan terhadap “proses EITI” mencakup kegiatan yang berkaitan dengan persiapan untuk menjadi negara EITI; pertemuan kelompok pemangku kepentingan;

pertemuan konstituen organisasi masyarakat sipil, termasuk interaksi dengan perwakilan kelompok pemangku kepentingan; penyusunan Laporan EITI; penyusunan materi atau analisis terkait Laporan EITI; penyampaian pandangan terkait kegiatan EITI; dan penyampaian pandangan terkait tata kelola sumber daya alam.

Dalam menilai ketentuan masyarakat sipil, Dewan EITI dan Validator akan menerapkan tes berikut:

2.1 Penyampaian

Perwakilan masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam debat publik terkait proses EITI dan menyampaikan pendapat tentang proses EITI tanpa hambatan, paksaan, atau balasan.

Dewan EITI dan Validator akan mempertimbangkan sejauh mana:

- Perwakilan masyarakat sipil dapat berbicara secara bebas di depan umum tentang proses EITI, termasuk misalnya selama pertemuan kelompok pemangku kepentingan dan acara EITI (termasuk penerbitan Laporan EITI, acara publik, di media, dll.).
- Praktik di lapangan, termasuk pandangan beragam pemangku kepentingan atau bukti substansial yang disediakan oleh pihak ketiga independen, menunjukkan bahwa sensor diri atau pembatasan yang dikenakan sendiri oleh perwakilan masyarakat sipil telah dilakukan dalam kaitannya dengan proses EITI karena adanya rasa takut terhadap balasan, dan apakah hambatan semacam itu berdampak terhadap sosialisasi oleh perwakilan masyarakat sipil dan masukan publik terkait proses EITI.

2.2 Operasional

Perwakilan masyarakat sipil dapat beroperasi secara bebas dalam kaitannya dengan proses EITI.

Dewan EITI dan Validator akan mempertimbangkan sejauh mana iklim hukum, regulasi, administratif, dan situasi di lingkungan mempengaruhi kemampuan perwakilan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses EITI. Hal ini dapat mencakup, misalnya:

- Prosedur hukum atau administratif yang berkaitan dengan pendaftaran organisasi masyarakat sipil yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses EITI; pembatasan hukum atau administratif terhadap akses pendanaan yang tidak memungkinkan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses EITI; kendala hukum atau administratif yang menyulitkan organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan pertemuan terkait proses EITI; hambatan hukum atau administratif dalam sosialisasi dan masukan publik terkait proses EITI, dll.
- Bukti apa pun yang menunjukkan bahwa hak-hak dasar perwakilan masyarakat sipil telah dibatasi dalam kaitannya dengan implementasi proses EITI, seperti pembatasan terhadap kebebasan berekspresi atau kebebasan bergerak.

2.3 Asosiasi

Perwakilan masyarakat sipil dapat berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain terkait proses EITI.

Dewan EITI dan Validator akan mempertimbangkan sejauh mana:

- Perwakilan kelompok masyarakat sipil multi-pihak dapat mencari dan tidak dibatasi untuk berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil lain yang tidak

termasuk dalam kelompok multi-pihak, termasuk mencari masukan untuk pembahasan kelompok multi-pihak dan menyampaikan hasil pembahasan kelompok multi-pihak.

- Saluran komunikasi formal atau informal antara anggota kelompok multi-pihak masyarakat sipil dan konstituensi masyarakat sipil yang lebih luas tidak dibatasi.
- Perwakilan kelompok masyarakat sipil multi-pihak tidak dibatasi untuk melakukan kegiatan penjangkauan ke masyarakat sipil yang lebih luas, termasuk terkait dengan pembahasan tentang representasi kelompok multi-pihak dan proses EITI.

2.4 Keterlibatan

Perwakilan masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara penuh, aktif, dan efektif dalam perancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi proses EITI.

Dewan EITI dan Validator akan mempertimbangkan sejauh mana:

- Perwakilan masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara penuh dan memberikan masukan dalam proses EITI. Hal ini dapat mencakup, misalnya, bukti masukan dan advokasi terkait pembahasan kelompok pemangku kepentingan utama mengenai isu-isu seperti tujuan dan kegiatan rencana kerja; cakupan proses pelaporan EITI; persetujuan Laporan EITI; penilaian mandiri tahunan terhadap proses EITI melalui laporan kegiatan tahunan; Validasi, dll. Hal ini juga dapat mencakup bukti bahwa masyarakat sipil secara teratur berpartisipasi dalam pertemuan kelompok pemangku kepentingan, kelompok kerja kelompok pemangku kepentingan, dan acara EITI lainnya, serta bahwa pandangan organisasi masyarakat sipil diperhitungkan dan didokumentasikan dalam notulen pertemuan kelompok pemangku kepentingan.
- Perwakilan masyarakat sipil menganggap bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk berpartisipasi dalam EITI. Hal ini harus mencakup bukti bahwa kendala kapasitas teknis, keuangan, atau lainnya yang memengaruhi masyarakat sipil telah dipertimbangkan, dan bahwa rencana untuk mengatasi kendala tersebut telah disepakati dan/atau dilaksanakan, termasuk dengan memberikan akses ke peningkatan kapasitas atau sumber daya.

2.5 Akses ke pengambilan keputusan publik

Perwakilan masyarakat sipil dapat berbicara secara bebas mengenai isu-isu transparansi dan tata kelola sumber daya alam, serta memastikan bahwa EITI berkontribusi pada debat publik.

Dewan EITI dan Validator akan mempertimbangkan sejauh mana:

- Perwakilan masyarakat sipil dapat menggunakan proses EITI untuk mendorong debat publik, misalnya melalui acara publik, lokakarya, dan konferensi yang diselenggarakan oleh atau dengan partisipasi masyarakat sipil untuk menyosialisasikan proses dan hasil EITI.
- Perwakilan masyarakat sipil dapat terlibat dalam kegiatan dan diskusi mengenai tata kelola sumber daya alam, termasuk misalnya melalui analisis dan advokasi terkait isu-isu sumber daya alam; penggunaan data EITI; interaksi dengan media; pengembangan alat untuk menyampaikan temuan Laporan EITI, dan sebagainya.

2.6 Dokumentasi

Dokumentasi yang tersedia dari kelompok multi-pihak dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses EITI, serta hasil konsultasi langsung dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada anggota kelompok multi-

pihak, harus dipertimbangkan saat mengumpulkan bukti di atas.

Untuk tujuan kontekstual, Dewan EITI akan meninjau lingkungan yang lebih luas di mana EITI beroperasi, misalnya dengan merujuk pada indikator atau jenis penilaian lain yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam 2.1–2.5 di atas.

3. Kendala situasional terhadap perwakilan masyarakat sipil

- 3.1 Tuduhan atau laporan situasional mengenai potensi kendala atau aktual terhadap perwakilan masyarakat sipil di negara-negara yang menerapkan EITI sebaiknya dibahas dan dijawab terlebih dahulu oleh kelompok multi-pihak, dengan melihat pertimbangan keamanan dari pihak-pihak yang terdampak terkait penyampaian secara langsung masalah di dalam negeri.
- 3.2 Dewan EITI, melalui Komite Cepat Tanggapnya, dapat diminta untuk mengusut kasus-kasus tertentu dan menangani dugaan pelanggaran Prinsip EITI dan Persyaratan EITI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan EITI akan mempertimbangkan permintaan tersebut dengan memperhatikan fakta kasus, kebutuhan untuk mematuhi Prinsip EITI, serta prinsip perlakuan yang konsisten antar negara. Sesuai dengan Bagian 2 Standar EITI, “jika Dewan EITI khawatir bahwa kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip EITI dan Persyaratan EITI terganggu, Dewan EITI dapat menugaskan Sekretariat Internasional EITI untuk mengumpulkan informasi tentang situasi tersebut dan menyusun laporan kepada Dewan EITI”. Jika terdapat kekhawatiran terkait partisipasi masyarakat sipil, Dewan EITI akan berusaha untuk menentukan apakah ada hubungan langsung dengan proses EITI, termasuk dengan cara (i) mendokumentasikan fakta kasus; (ii) mengumpulkan pandangan pemangku kepentingan; dan (iii) menerapkan tes yang tercantum dalam 2.1–2.5 di atas.
- 3.3 Tergantung pada situasi kasus, termasuk sejauh mana dapat dibuktikan adanya hubungan langsung antara masalah yang diangkat dan proses EITI, Dewan EITI akan mempertimbangkan tanggapan yang sesuai. Hal ini dapat mencakup, misalnya, surat dari Ketua EITI atau Dewan EITI kepada pemerintah yang bersangkutan; misi Dewan EITI atau Sekretariat Internasional EITI untuk negara tersebut; melakukan penilaian independen; mengeluarkan pernyataan Dewan EITI; menyetujui tindakan perbaikan, termasuk pemantauan implementasi; atau meminta Validasi kepatuhan suatu negara terhadap ketentuan yang bersangkutan. Sesuai dengan Bagian 2 Standar EITI, “jika secara jelas terlihat bahwa aspek penting dari Prinsip EITI dan Persyaratan EITI tidak dipatuhi oleh negara pelaksana, Dewan EITI akan menangguhkan atau menghapus negara tersebut dari daftar.” Dalam kasus di mana Dewan EITI menyimpulkan bahwa kekhawatiran yang diamati tidak melanggar suatu ketentuan atau tidak cukup terkait dengan proses EITI, Dewan akan menggunakan kewenangannya untuk menentukan apakah akan mengambil tindakan, dengan memprioritaskan kebutuhan untuk mematuhi Prinsip-prinsip EITI dan memastikan perlakuan yang konsisten antar negara.

BAGIAN 6

Kode etik Asosiasi EITI

Bagian ini menetapkan prinsip dan standar yang mengarahkan perilaku seluruh Pemegang Jabatan EITI.

Dewan EITI mengadopsi Kode Etik ini pada Maret 2014, dan versi revisinya disahkan pada Desember 2022.

Kode Etik ini berlaku untuk semua anggota Dewan EITI, anggota pengganti (alternates), Anggota Asosiasi EITI, staf sekretariat (nasional dan internasional), serta anggota kelompok pemangku kepentingan multipihak.

Pasal 1: Ruang Lingkup

Semua anggota Dewan EITI, anggota pengganti, Ketua EITI, anggota Asosiasi EITI, staf sekretariat (nasional dan internasional), dan anggota kelompok pemangku kepentingan EITI (selanjutnya disebut sebagai “Pejabat EITI”) wajib mematuhi Kode Etik ini.

Pasal 2: Perilaku pribadi, integritas, dan nilai-nilai

Pejabat EITI wajib menjunjung standar integritas dan etika tertinggi serta bertindak dengan jujur dan pantas. Perilaku pribadi dan profesional Pejabat EITI setiap saat harus mencerminkan sikap yang layak dihormati dan dipercaya sesuai dengan kedudukan mereka sebagai pejabat suatu asosiasi yang mendorong penerapan standar internasional dalam transparansi dan akuntabilitas, serta harus berkontribusi pada tata kelola yang baik EITI.

Pejabat EITI diharapkan menjadi teladan dan mewakili EITI dengan iktikad baik, kejujuran, integritas, kehati-hatian, serta kompetensi yang memadai, dengan cara yang menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pribadi mereka dan integritas EITI, serta memastikan bahwa hubungan mereka dengan EITI senantiasa mencerminkan keteladanan yang baik.

Dengan mengakui peran ganda Pejabat EITI yang mewakili EITI sekaligus kepentingan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil, serta pentingnya perdebatan publik yang berlandaskan informasi mengenai tata kelola sektor ekstraktif, Pejabat EITI harus menahan diri dari tindakan, termasuk kegiatan lobi, yang melanggar ketentuan Pasal 3 di bawah ini. Yang dimaksud dengan “kegiatan lobi” mencakup kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi perumusan atau pelaksanaan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan pemerintah nasional.

Pasal 3: Kepatuhan

Pejabat EITI harus melaksanakan tugasnya terhadap EITI sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku serta sesuai dengan Anggaran Dasar EITI, Prinsip-prinsip EITI, Standar EITI, dan kebijakan EITI.

Pasal 4: Hormat terhadap Orang Lain

Pejabat EITI akan menghormati martabat, kebutuhan terkait EITI, dan kehidupan pribadi orang lain, serta menggunakan wewenang yang tepat dan pertimbangan yang baik dalam berinteraksi dengan rekan kerja, anggota badan EITI lainnya, staf, masyarakat umum, dan siapa pun yang mereka temui selama menjalankan tugas mereka bagi EITI.

Pasal 5: Profesionalisme

Pejabat EITI harus melaksanakan tugas yang diemban dengan profesional dan tepat waktu, serta berusaha sebaik mungkin untuk secara rutin mengikuti kegiatan pengembangan profesional guna mendukung pelaksanaan tugas mereka terhadap EITI.

Pasal 6: Keragaman dan Inklusi

Pejabat EITI dilarang melakukan atau memfasilitasi perilaku diskriminatif atau pelecehan terhadap siapa pun yang mereka temui dalam rangka pelaksanaan tugas mereka kepada EITI. Pejabat EITI wajib secara aktif mendukung keragaman dan inklusi dalam rangka pelaksanaan tugas mereka terhadap EITI.

Pasal 7: Kerahasiaan

Pejabat EITI tidak boleh menggunakan informasi apa pun yang diperoleh dalam kapasitas mereka sebagai Pejabat EITI dan yang belum tersedia di domain publik untuk tujuan apa pun selain untuk melaksanakan tugas mereka kepada EITI. Pejabat EITI harus menghormati kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keterbukaan EITI dan Kebijakan Pengamat EITI untuk komite EITI. Pejabat EITI tetap terikat oleh kewajiban ini selama dua tahun setelah berakhirnya masa jabatan mereka, kecuali ada jangka waktu lain yang telah disetujui oleh Dewan EITI.

Pasal 8: Penggunaan Sumber Daya EITI dan Pengelolaan Aset EITI

Pejabat EITI wajib mematuhi prinsip nilai manfaat terhadap biaya (*value-for-money*) dan bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang dialokasikan untuk EITI. Tidak seorang pun Pejabat EITI diperbolehkan menyalahgunakan harta benda atau sumber daya EITI, dan wajib selalu menjaga keamanan harta benda EITI serta tidak memperbolehkan siapa pun yang tidak berwenang untuk memiliki atau menggunakan harta benda tersebut.

Pejabat EITI hanya diperbolehkan membebankan biaya perjalanan, operasional, atau biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pejabat EITI sesuai dengan biaya sebenarnya. Pembebanan biaya sesuai dengan biaya sebenarnya diutamakan daripada tunjangan harian. Pejabat EITI hanya dapat menyediakan barang atau jasa kepada EITI sebagai penyedia berbayar setelah melakukan pengungkapan penuh serta memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan EITI atau pemangku kepentingan multi-pihak EITI yang relevan.

Pasal 9: Konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan

Pejabat EITI harus selalu bertindak demi kepentingan terbaik EITI dan bukan untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, atau keuntungan finansial.

Pejabat EITI harus menghindari konflik kepentingan pribadi. Untuk tujuan kode ini,

konflik kepentingan adalah situasi atau keadaan di mana kepentingan Pejabat EITI mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kinerja objektif dan imparial tugas resmi EITI mereka. Dalam hal ini, kepentingan pribadi mencakup keuntungan apa pun bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, atau kenalan pribadi.

Pejabat EITI yang berada dalam situasi tersebut wajib mengundurkan diri dan memberitahukan hal tersebut kepada Dewan EITI atau kelompok pemangku kepentingan terkait. Bagi anggota Dewan EITI, yang berlaku adalah aturan yang ditetapkan dalam Pasal 5.6 Manual Dewan EITI.

Secara khusus, Pejabat EITI wajib mengikuti pedoman berikut:

- Hindari menempatkan (atau terkesan menempatkan) kepentingan pribadi di atas kepentingan EITI; meskipun penerimaan manfaat pribadi atau pihak ketiga yang bersifat insidental dapat timbul dari kegiatan terkait EITI, manfaat tersebut harus bersifat insidental terhadap manfaat utama bagi EITI dan tujuan EITI. Setiap tunjangan harian yang ditetapkan, dibayarkan, atau diperoleh harus didasarkan pada biaya sebenarnya yang wajar.
- Hindari melampaui wewenang yang diberikan. Pemegang Jabatan EITI tidak boleh menyalahgunakan jabatan EITI dengan menggunakan secara tidak semestinya Asosiasi EITI atau staf, layanan, peralatan, sumber daya, atau harta benda EITI untuk keuntungan atau kesenangan pribadi atau pihak ketiga; Pemegang Jabatan EITI tidak boleh menyatakan kepada pihak ketiga bahwa wewenang mereka sebagai Pemegang Jabatan EITI melampaui batas yang sebenarnya.
- Jangan terlibat dalam aktivitas pribadi di luar tugas yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, secara material merugikan EITI.

Pasal 10: Hadiah, perjalanan, dan hiburan

Pegawai Kantor EITI tidak boleh meminta atau menerima hadiah, uang tip, perjalanan gratis, honorarium, barang pribadi, atau barang berharga lainnya dari siapa pun atau entitas mana pun yang dimaksudkan untuk, atau yang secara wajar dapat dipersepsikan sebagai, insentif langsung atau tidak langsung untuk memberikan perlakuan khusus kepada pemberi hadiah tersebut terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan EITI.

Setiap pemberian atau penerimaan hadiah, perjalanan gratis, atau kompensasi lain yang nilainya melebihi USD 100 yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab EITI harus dilaporkan kepada Sekretariat Internasional EITI, yang akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut yang perlu diambil. Setiap hadiah yang dianggap berlebihan harus ditolak. Jika ada keraguan apakah suatu hadiah berlebihan, Pemegang Jabatan EITI harus mematuhi kebijakan EITI, termasuk Kebijakan Kepatuhan Anti-suap dan Anti-korupsi EITI, dan berkonsultasi dengan Sekretariat Internasional EITI atau kelompok pemangku kepentingan terkait.

Jika menolak pemberian tidak pantas, terutama karena penolakan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemberi, hadiah harus diserahkan kepada Sekretariat Internasional EITI atau kelompok pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11: Implementasi

Dewan EITI, kelompok pemangku kepentingan, dan sekretariat internasional dan nasional bertanggung jawab untuk memastikan Pejabat EITI memahami Kode Etik ini dan memberikan nasihat, serta pelatihan jika diperlukan, mengenai penafsiran dan implementasinya. Semua pihak, termasuk kelompok pemangku kepentingan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pejabat EITI memahami Kode Etik ini agar secara tahunan mengonfirmasi bahwa Pemegang Jabatan EITI telah memahami

Kode Etik dan melaporkan implementasinya kepada Dewan EITI melalui Sekretariat Internasional EITI.

Pasal 12: Pelaporan

Pejabat EITI atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian atau kekhawatiran terkait penafsiran, penerapan, atau dugaan pelanggaran Kode Etik ini wajib menyampaikan permasalahan tersebut kepada badan EITI terdekat sesuai dengan Kebijakan EITI tentang penyampaian kekhawatiran (*Policy on voicing concerns*). Dalam hal suatu permasalahan disampaikan kepada Dewan EITI sesuai dengan Kebijakan tentang penyampaian kekhawatiran, Dewan EITI akan mempertimbangkan keadaan yang ada dan menilai apakah tindakan diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Asosiasi EITI, Prinsip-Prinsip EITI, Standar EITI, serta kebijakan EITI. Setiap orang yang merasa tidak nyaman untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada badan EITI terdekat dapat menyampaikan kekhawatirannya kepada Dewan EITI melalui Komite Tata Kelola dan Pengawasan (*Governance and Oversight Committee*) beserta ketuanya, sesuai dengan Kebijakan EITI tentang penyampaian kekhawatiran.

BAGIAN 7

Kebijakan data terbuka

Bagian ini memaparkan rekomendasi tentang penerbitan data terbuka bagi negara-negara yang menerapkan EITI.

Prakata

1. Kebijakan ini berisikan rekomendasi mengenai data terbuka dalam implementasi EITI dalam lingkup yang telah disepakati pada tingkat nasional. Kebijakan ini melengkapi persyaratan mengenai data terbuka sesuai dengan Persyaratan 7. Kebijakan ini didasarkan pada pelajaran yang dipetik dari implementasi di tingkat nasional dan praktik terbaik internasional yang sedang berkembang⁵ serta mendorong pengungkapan sistematis.
2. Prinsip-prinsip EITI menyatakan bahwa “pemahaman publik tentang penerimaan dan belanja negara sepanjang waktu [dapat] mendukung debat publik dan memberikan informasi untuk pemilihan opsi yang tepat dan realistis untuk pembangunan berkelanjutan” (Prinsip EITI 4). Standar EITI oleh karena itu mensyaratkan pengungkapan EITI untuk “dapat dipahami, disosialisasikan secara aktif, dapat diakses publik, dan berkontribusi terhadap debat publik” (Persyaratan 7.1). Meningkatkan aksesibilitas, keandalan, relevansi, ketepatan waktu, dan keterbandingan data EITI sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini.
3. Untuk membantu mewujudkan Prinsip-prinsip EITI, Dewan EITI telah sepakat bahwa pengungkapan sistematis data EITI melalui sistem pemerintah dan perusahaan kini menjadi ekspektasi utama. EITI mendorong pengungkapan rutin dari entitas pelapor dalam format terbuka di tingkat nasional dalam lingkup implementasi EITI yang telah disepakati.
4. EITI menyadari bahwa kondisi di setiap negara pelaksana berbeda-beda, bahwa tidak semua negara dapat beralih ke data terbuka dengan kecepatan yang sama, dan bahwa implikasi keuangan perlu dipertimbangkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Permintaan dari masyarakat dan penggunaan data untuk menangani isu kebijakan publik juga perlu dipertimbangkan.⁶ Tantangan akses dan kebutuhan informasi dari berbagai gender dan kelompok masyarakat juga perlu diperhatikan.

Tujuan data terbuka

5. Data terbuka dari implementasi EITI dapat meningkatkan transparansi aktivitas pemerintah dan dunia usaha serta meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sumber daya alam negara dikelola. Data ini dapat mengungkap siapa pemilik perusahaan ekstraktif; siapa yang memegang lisensi dan izin; apa syarat fiskal yang berlaku; dan apa penerimaan ekstraktif yang dikenakan dan dibelanjakan. Pengungkapan seperti ini memberikan insentif kuat agar penerimaan digunakan secara efektif.
6. Data terbuka efektif dan bermanfaat ketika disajikan tepat waktu, berkualitas baik, dan memenuhi kebutuhan serta harapan pemangku kepentingan. Implementasi EITI harus mengedepankan akuntabilitas dan tata kelola yang baik; meningkatkan debat publik dan partisipasi warga; membantu memerangi korupsi melalui

-
- 5 Termasuk Kemitraan Pemerintah Terbuka, Piagam Data Terbuka G8 dan Lampiran Teknis, Piagam Data Terbuka, Definisi Terbuka, dan Konsorsium World Wide Web (W3C) untuk pengembangan standar data.
 - 6 Kuncinya adalah "mempublikasikan dengan tujuan", artinya publikasi data harus terintegrasi dalam menyelesaikan masalah kebijakan specific.

akuntabilitas pemerintah yang lebih baik; dan meningkatkan penyampaian layanan pemerintah. Penyediaan akses terhadap data yang komprehensif dapat memberdayakan individu, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai layanan yang mereka terima dan standar yang seharusnya diharapkan. Data terbuka juga dapat menjadi alat yang berharga bagi pemerintah dalam meningkatkan perumusan kebijakan dan pengelolaan sektor.

7. Akses bebas dan penggunaan data terbuka memiliki nilai yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Hal ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi kelompok pemangku kepentingan multipihak di negara-negara yang menerapkan EITI.
8. Standar data yang terus berkembang dapat berkontribusi dalam meningkatkan interoperabilitas data. Penerapan standar data juga mendukung keberlanjutan penerbitan data, memperkuat kapasitas pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam menyiapkan dan menerbitkan data melalui pemanfaatan perangkat dan sumber daya yang tersedia, serta mendukung pemanfaatan dan analisis data apabila standar tersebut dirancang secara tepat dan didukung oleh komunitas pengguna.

Data terbuka dalam implementasi EITI

9. Negara-negara yang mengimplementasikan EITI didorong untuk:
 - a) Menerbitkan data terbuka secara sistematis dengan mengintegrasikan kebijakan dan strategi data terbuka dalam entitas pelaporan yang terlibat dalam pelaporan EITI, untuk memastikan pengungkapan data yang tepat waktu, berkualitas tinggi, dapat diakses, dan efisien dari segi biaya.
 - b) Bekerja sama dengan pengguna untuk mengidentifikasi kumpulan data prioritas dan bentuk penyampaian data yang paling sesuai.⁸
 - c) Mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang berbeda dan tantangan akses berdasarkan representasi gender, etnis, dan keterwakilan geografis.
 - d) Memastikan bahwa data tersedia dalam format rinci dan dapat dibaca oleh mesin, serta dijelaskan secara lengkap, sehingga pengguna memiliki informasi yang cukup untuk memahami kelebihan, kekurangan, keterbatasan analitis, dan persyaratan keamanan data, termasuk cara pengolahannya.
 - e) Merilis data sesegera mungkin, memungkinkan pengguna memberikan umpan balik, dan terus melakukan revisi untuk memastikan standar kualitas data terbuka yang tertinggi.
 - f) Merilis data di bawah lisensi terbuka, dengan preferensi Creative Commons Attribution 4.0, yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh dan menggunakan kembali data tersebut dengan bebas.⁹

- g) Berbagi keahlian teknis dan pengalaman dengan negara lain untuk memaksimalkan potensi data terbuka secara inklusif secara sosial.

-
- 7 Lihat misalnya Open Ownership (tanpa tanggal), "Beneficial Ownership Data Standard", diakses dari <https://standard.openownership.org/en/0.3.0/>; Open Contracting (tanpa tanggal), "Open Contracting Data Standard", diakses dari <https://standard.open-contracting.org>.
- 8 Pengguna dapat merujuk pada masyarakat, media, akademisi, dan lembaga pemerintah lainnya yang menggunakan data dari lembaga lain untuk penyediaan layanan mereka sendiri.
- 9 Lihat Open Knowledge Foundation (tanpa tanggal), "Menghindari Silo Penggunaan Data". Diakses dari <https://research.okfn.org/avoiding-data-use-silos/>.

- h) Bekerja untuk meningkatkan literasi data terbuka dan mendorong orang-orang, seperti pengembang aplikasi dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang promosi data terbuka, untuk mengoptimalkan nilai data terbuka.
- i) Pastikan data kompatibel dengan standar nasional dan internasional,¹⁰ termasuk mengadopsi standar data yang disetujui oleh Dewan EITI dan panduan tambahan yang disediakan oleh Sekretariat Internasional EITI.
- j) Apabila memungkinkan, dukung pengaitan data (*cross-referencing*) dengan kumpulan data lainnya melalui penggunaan pengenalan unik, berkelanjutan, dan publik untuk entitas komersial maupun entitas pemerintah.
- k) Mempertimbangkan infrastruktur teknis untuk penyampaian dan penggunaan data terbuka.¹¹
- l) Mempertimbangkan tata kelola dan keberlanjutan kebijakan data terbuka untuk memastikan bahwa entitas pelapor memiliki pengelola data (*data steward*), data disimpan dan dipertahankan, serta standar keamanan telah diterapkan.

Keterlibatan dengan komunitas data terbuka

10. Untuk belajar dari dan turut membentuk praktik terbaik dalam data terbuka pemerintah, negara-negara pelaksana EITI didorong untuk mendukung Piagam Data Terbuka (*Open Data Charter*)¹² dan inisiatif relevan lainnya.
11. Untuk mentransfer pelajaran yang dipetik dari negara-negara EITI dan mengambil manfaat dari pengalaman internasional, Sekretariat Internasional EITI sebaiknya terlibat dalam kelompok kerja yang berfokus pada data terbuka, sepanjang dipandang saling melengkapi.

-
- 10 Lihat misalnya Direktori Standar Data Terbuka (tanpa tanggal). Diunduh dari <http://datastandards.directory/>.
 - 11 Infrastruktur teknis merujuk pada teknologi informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk memungkinkan pengumpulan data, pembersihan data, pengaitan dengan kumpulan data lainnya, serta penerbitan data. Pemetaan ekosistem data dapat menjadi salah satu cara untuk memetakan infrastruktur teknis serta para pelaku yang terkait dengan pengumpulan, kurasi, dan penerbitan data.
 - 12 Lihat Piagam Data Terbuka (tanpa tanggal), "Dukung Prinsip-prinsip ODC". Diakses dari <https://opendatacharter.net/endorse-the-charter/>.

